

WARTA PENGAWASAN

NOMOR 4 TAHUN 2019

KAWAL AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



**“MENGAWAL PEMBANGUNAN
SDM INDONESIA”**



Majalah Warta Pengawasan merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP
Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta
Timur 13120 Tel/Fax. 62 21 85910031, pes
0102 dan 0103, Diterbitkan Oleh: Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala
BPKP Nomor: Kep-204/K/SU/2013 Tanggal
26 Maret 2013 STT Nomor: 958/SK/Ditjen
PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982,
ISSN 0854-0519, *Homepage*: www.bpkp.go.id - *Email*: warta_pengawasan@bpkp.go.id.
Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh
atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Majalah Warta Pengawasan dapat
di unduh melalui



EDITOR'S NOTE

"Great vision without great people is irrelevant" - Jim Collins

Tahukah Pembaca, meski Indonesia menembus 10 besar pengguna internet di dunia, hal tersebut tidak berarti bahwa kita telah siap menerjang gelombang revolusi industri 4.0. Riset McKinsey menyebutkan bahwa Indonesia akan kekurangan talenta digital (*digital talent*) sebanyak 9 juta orang hingga tahun 2030. Belum lagi prediksi hilangnya 800 juta pekerjaan di seluruh dunia semakin membayangi Indonesia yang sudah memasuki jendela peluang bonus demografi sejak 2012 lalu. Ya, bonus demografi dan revolusi industri yang sedang kita hadapi ini tentu bisa menjadi peluang dan ancaman. Agar siap menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah tentu perlu terus berbenah, baik dari segi infrastruktur, payung hukum, maupun kompetensi SDM. Visi Indonesia Maju yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo secara serius menuntut adanya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak guna memperkuat SDM Indonesia dan menjadi bangsa yang adaptif, termasuk di era digital ini.

Terkait pengawalan akuntabilitas, BPKP menyadari perlunya cara-cara baru dalam menjalankan pengawasan maupun pengembangan kompetensi APIP. Berbagai inovasi terus dilakukan mulai dari pengembangan pembelajaran secara digital (*digital learning*), transformasi menjadi GIA Corpu yang sudah dibahas pada edisi sebelumnya, hingga berbagai *tools* yang dikembangkan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan negara, seperti SIMDA *Integrated*, Siskeudes, Siswaskeudes, SIA BUMDes, dan *tools* lainnya. Pengawalan tersebut tentu tidak hanya berhenti di produk keluaran (*output*). Di majalah Warta Pengawasan edisi kali ini, redaksi menyuguhkan gambaran tentang bagaimana BPKP terus bergerak untuk memberikan hasil pengawasan yang berdampak sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan. Memasuki lima tahun implementasi Siskeudes, pada rubrik *Special Event*, Pembaca akan diajak terbang ke Mamasa untuk menelusuri sejarah

pengawalan keuangan desa, sebagai momen awal 'lahirnya' aplikasi Siskeudes. Simak juga penuturan Kepala Desa Bandung Jaya, Kepahiang, Provinsi Bengkulu mengenai bagaimana Siskeudes telah membantu pengelolaan keuangan desanya di rubrik *Inspiring Person*. Selanjutnya terkait pengembangan kompetensi APIP, Pembaca dapat melangkah ke rubrik *Governance Vantage Point* untuk mengetahui konsep *Center of Excellence* yang dibangun sebagai pusat keunggulan dan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*). Sudah kenal dengan Siswaskeudes? Apa *sih* bedanya dengan Siskeudes? Silakan nikmati sajian visualnya pada halaman infografis untuk memahami peranannya dalam pengawasan keuangan desa. Tentu, menikmati edisi kali ini tak lengkap jika tak mengikuti ulasan buku, film, dan objek wisata sebagai penyegaran mental. Pemburu senja tentu harus tahu *dong* tips menikmati matahari terbenam yang indah di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu! Selamat Membaca.

Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Kepala BPKP - **Pembina:** Sekretaris Utama - **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP - **Penganggung Jawab:** Syaifudin Tagamal - **Kontributor Ahli:** Maliki Heru Santosa, Djoko Prihardono, Amdi Very Darma, Edi Mulia - **Kontributor Tetap:** Nani Ulina, Fauzi, Setya Nugraha - **Pemimpin Umum:** Catur Iman Pratigny - **Wakil Pemimpin Umum:** M. Muslihuddin - **Pemimpin Redaksi:** Betrika Oktaresa - **Pemimpin Administrasi:** Ratna Wijihastuti - **Redaktur Pelaksana:** Dian Setyawati - **Sekretaris Redaksi:** Hilwiya Agustine - **Reporter:** Suryo Cahyo Putro, Gilang Rahmat Hastanto, Ayu Isni Arum, Nadia Khaerunnisa, Amalia Septianti, Adithia Ramadhan, Devina - **Keuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Ichi Daroma Agustin, Viana Anggraeni Zahrin - **Administrasi:** Budi Sutjahyo, Nursanty Sinaga, R. Hanifah - **Dokumentasi:** Edi Purwanto, Adi Sasongko - **Sirkulasi:** R. Hanifah

CONTENTS

04

COVER STORY

- 04 Mengawal Pembangunan SDM Indonesia
- 08 Membangun SDM BPKP Berkelas Dunia

12

SPECIAL EVENTS

- 12 Sekilas Sejarah Siskeudes, Sahabat Desa Akuntabel
- 17 Mamasa, Negeri di Atas Awan Tempat Lahir Siskeudes

21

INFOGRAPHIC

Implementasi Aplikasi Siskeudes v2.0

24

INDONESIA THIS QUARTER

28

GOVERNANCE VANTAGE POINT

Bangun Tata Kelola Berbagi Pengetahuan melalui *Center of Excellence*

32

RISK MANAGEMENT VANTAGE POINT

Masyarakat Risiko dan Implementasi Manajemen Risiko di Birokrasi

36

SPIP TALK

38

ORGANIZATIONAL CULTURE

Bangun Kapabilitas APIP dengan *Mentorship*





41

CERTIFICATION

Mau Keren Bak Detektif? Yuk Ikut
Sertifikasi Ini

44

JFA TALK

47

INSPIRING PERSON

Membangun Indonesia dari Desa

50

BOOK REVIEW

Selasa Bersama Morrie

52

MOVIE REVIEW

Petualangan Serimba

54

THE BEAUTY OF INDONESIA

Bergeser ke Pulau Tidung





Foto
Adithia

MENGAWAL PEMBANGUNAN SDM INDONESIA

Betrika Oktaresa

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selalu mengingatkan tentang cita-cita Indonesia untuk nantinya dapat terbebas dari jebakan pendapatan kelas menengah, menjadi negara maju pada tahun 2045 atau tepat pada satu abad negeri ini merayakan kemerdekaannya. Hal ini juga relevan dengan prediksi bahwa pada tahun 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Tentu saja, bonus demografi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga peningkatan kualitas SDM merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, selain inovasi, pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama dalam menghadapi dunia yang penuh risiko, sangat dinamis, dan sangat kompetitif.

Prioritas Membangun SDM

Hal ini tergambar dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menyatakan bahwa salah satu dari lima arahan utama presiden adalah pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Tujuannya adalah mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dengan berfokus pada tiga pilar pembangunan, yaitu layanan dasar dan perlindungan



Foto
Adithia

sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Fokus pembangunan SDM ini merupakan lanjutan dari program-program yang telah dilaksanakan pada periode RPJMN sebelumnya. Dari agenda-agenda dan program-program yang telah dilakukan itu, tingkat keberhasilannya dapat dilihat melalui beberapa indikator yang sangat erat dengan kualitas SDM, yaitu terkait dengan bidang pendidikan dan kesehatan. Misalnya, berkurangnya laju pertumbuhan penduduk, turunnya angka kelahiran total, turunnya prevalensi *stunting* pada balita, meningkatnya cakupan kepesertaan JKN kesehatan, meningkatnya rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas, dan indikator-indikator lainnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya Oktober lalu, Pemerintah harus mampu untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya selesai dikerjakan (*sent*), namun manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat (*delivered*). Sehubungan dengan itu, pemerintah saat ini tidak hanya peduli pada aspek pencapaian hasil (*program delivery*) semata, namun pemerintah juga sangat memperhatikan aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan program, karena tujuan pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui penyelenggaraan proses pembangunan yang akuntabel. Oleh karena itu, untuk memastikan terjaganya aspek akuntabilitas, maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak

termasuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI juga telah melakukan pengawalan program-program pemerintah, salah satunya yang terkait dengan pembangunan SDM nasional.

Pengawalan oleh BPKP

Dalam periode RPJMN sebelumnya, yaitu periode 2015-2019, BPKP telah melaksanakan pengawalan terkait dengan program pembangunan SDM yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada bidang pendidikan, BPKP melakukan pengawasan atas Program Indonesia Pintar yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Selain itu, beberapa kegiatan pengawasan lain di bidang pendidikan yang dilakukan antara lain pada tahun 2015, BPKP melakukan Audit Dana Bantuan Operasional PTN, Audit Tunjangan Profesi Guru TK NonPNS, dan Pemetaan Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah. Pada tahun berikutnya, BPKP melaksanakan Audit Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah dan Monitoring Bantuan Sosial Sarana

dan Prasarana Pendidikan. Di tahun 2017, BPKP melakukan Monitoring BOS dan Guru Non PNS SMA/SMK dan Audit BOPTN&BPPTN BH. Kemudian, pada tahun 2018 dan 2019, BPKP terus melakukan pengawasan akuntabilitas di bidang pendidikan, di antaranya Evaluasi atas Revitalisasi SMK TA 2017, Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan, dan Evaluasi atas Program Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri.

Di bidang kesehatan, BPKP juga melakukan pengawasan atas Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Lalu, beberapa kegiatan pengawasan lain yang dilakukan antara lain Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), *Audit Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)*, Audit Kinerja Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada BKKBN, Audit Kepatuhan atas Pembiayaan Aset dan Hibah pada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan, dan pengawasan terkait penanganan program penanggulangan *stunting*.

Membangun Pengawasan Integratif

Kembali lagi, merespon arahan Presiden bahwa program pemerintah yang tidak hanya terlaksana tapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, informasi pengawasan BPKP yang terkait dengan prioritas pembangunan SDM Nasional yang disampaikan seharusnya mencakup penilaian efektivitas implementasi kebijakan pemerintah, hambatan-hambatan yang

ditemui, hingga rekomendasi perbaikan kebijakannya. Dengan kata lain, pengawasan intern yang dilakukan tidak hanya cukup berhenti pada pengukuran apakah *output* telah sesuai, tetapi juga harus diukur apakah dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diekspektasikan. Untuk dapat membangun informasi yang strategis tersebut, BPKP sedang dalam proses merumuskan kebijakan pengawasan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan konvergensi pengawasan lintas *sectoral* yang *inline* dengan visi pembangunan Presiden periode 2020-2024.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh BPKP adalah dengan secara intens berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Koordinator, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Koordinasi tersebut penting dilakukan guna memperoleh informasi tentang Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP), termasuk juga penanggung jawabnya. Selain itu, perlu dipahami tentang kerangka logis hubungan kinerja antara PP dan PN, antara KP dan PP, dan antar-KP. Sebagai gambaran, informasi tersebut akan sangat mendukung konvergensi pengawasan PP atas PN dalam RKP tahun 2020 yang salah satunya akan melakukan pengawasan PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Nantinya, kerangka tersebut akan di-*breakdown* dalam pengawasan beberapa PP yang masing-masing terdiri dari beberapa rencana pengawasan yang akan dilakukan oleh BPKP, dengan melakukan pengawasan intern lintas sektoral. Kegiatan pengawasan yang dilakukan akan dikoordinasikan oleh satu kedeputian sebagai *leading sector* dan didukung oleh kedeputian teknis lainnya yang juga melakukan kegiatan pengawasan terkait. Melalui upaya ini, diharapkan program pembangunan SDM yang dilaksanakan oleh Pemerintah nantinya dapat diukur keberhasilannya bukan hanya dari perspektif ‘terimplementasi’, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut termasuk menjaga agar pelaksanaan program tersebut tetap akuntabel. Tentu saja, untuk mampu menjawab ekspektasi-ekspektasi tersebut, SDM BPKP dan APIP lainnya perlu terus-menerus dikembangkan secara dinamis, yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan dari pemangku kepentingannya.



MEMBANGUN SDM BPKP BERKELAS DUNIA

Betrika Oktaresa

“Human resources are the most valuable assets the world has. They are all needed desperately” – Eleanor Roosevelt

Berangkat dari visi sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki mandat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan perannya selaku auditor Presiden, BPKP dituntut untuk mampu menyelenggarakan fungsi pengawasan intern yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Pengawasan yang

dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mendorong *likelihood* tercapainya tujuan-tujuan pembangunan, melalui pengawasan akuntabilitas proses penyelenggaraan program-program pembangunan. Merespons kebutuhan pemerintah saat ini, hasil informasi pengawasan BPKP yang disampaikan kepada Presiden ataupun *stakeholder* lainnya juga diharapkan dapat mencakup efektivitas implementasi kebijakan pemerintah, hambatan-hambatan yang ditemui, hingga rekomendasi penyelesaian masalah atau perbaikan kebijakan.

Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaksanaan pengawasan intern atas efektivitas penyelenggaraan program pembangunan tidak cukup hanya dengan mengukur apakah *output* yang dihasilkan telah sesuai, namun juga harus diukur apakah dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, auditor intern (dalam hal ini BPKP) perlu memiliki kompetensi untuk melakukan analisis di tingkat operasional hingga makro. Hal itu mencakup kemampuan mengidentifikasi indikator dampak yang tepat untuk digunakan sebagai kriteria keberhasilan program, kompetensi untuk mengumpulkan data (*evidence*) makro yang relevan, kompetensi analisis hubungan antara dampak dan kebijakan, serta kemampuan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan secara tepat.

Tantangan besar tersebut tentu memerlukan dukungan besar sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, BPKP perlu melakukan investasi pada SDM yang dimilikinya. Apa yang dimaksud dengan investasi SDM? Yaitu berupa kegiatan pengembangan pegawai yang bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran individu dan organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Untuk memastikan agar kegiatan pengembangan pegawai dapat selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi, maka diperlukan rencana pengembangan pegawai yang disesuaikan dengan peran strategis organisasi.

Program Pengembangan Pegawai yang Komprehensif

Lalu, bagaimana BPKP merencanakan pengembangan pegawainya? BPKP telah menyusun dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang merupakan suatu dokumen perencanaan yang komprehensif, yang mencakup program-program pengembangan SDM organisasi berupa program gelar dan program nongelar dengan mengacu pada kebutuhan organisasi yang tercermin dari visi, misi, strategi, tugas, dan fungsi BPKP serta rencana strategis Pemerintah Republik Indonesia. Dengan tersedianya dokumen tersebut, kegiatan pengembangan pegawai di BPKP diharapkan dapat fokus untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang mendukung capaian tujuan organisasi.

Program pengembangan pegawai yang disusun dalam HCDP harus dapat menutup *gap* antara kompetensi pegawai yang diperlukan organisasi dengan kompetensi pegawai yang telah ada. Kompetensi pegawai yang diperlukan organisasi dapat diidentifikasi berdasarkan *job family*. Nah, apa yang dimaksud dengan *job family*? *Job family* merupakan pengelompokan pekerjaan yang memiliki karakteristik dan memerlukan kompetensi yang serupa, terdiri atas 8 (delapan) *job family*, yaitu pengawasan, teknologi informasi dan komunikasi, hukum, keuangan, perlengkapan dan

umum, sumber daya manusia, perencanaan, dan penelitian.

Karena memiliki karakteristik yang berbeda di antara kedelapan *job family* tersebut, kompetensi yang perlu dimiliki pun berbeda dan perlu dirumuskan dalam bentuk profil kompetensi. Dalam HCDP BPKP Periode 2018-2022, profil kompetensi terdiri dari kompetensi perilaku dan kompetensi teknis. Kompetensi perilaku terdiri dari kompetensi perilaku umum yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai di semua *job family*, tetapi derajat kemampuan yang disyaratkan dibedakan untuk setiap level dan jalur karir yang berbeda. Kemudian, kompetensi perilaku terkait *leadership*, sama dengan kompetensi perilaku umum, kompetensi ini juga harus dimiliki oleh seluruh pegawai di semua *job family*, yang membedakan hanya level dan jalur karirnya, semakin tinggi level pegawai maka kompetensi *leadership* yang diperlukan semakin tinggi. Kompetensi perilaku terakhir adalah kompetensi perilaku terkait *job family*. Sesuai dengan namanya, maka kompetensi ini dapat berbeda sebagian untuk masing-masing *job family*.

Kompetensi teknis terdiri dari kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis terkait *job family*. Kompetensi teknis umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai di semua *job family* dengan level *proficiency* yang disyaratkan berbeda untuk setiap level dan jalur karir yang berbeda. Kompetensi ini

meliputi kemampuan komputer, kemampuan Bahasa Inggris, pengetahuan reformasi birokrasi, kemampuan tata laksana administrasi, pengetahuan mengenai *governance*, *risk*, dan *control* organisasi, pelaksanaan manajemen keuangan, standar layanan, serta pengetahuan peraturan perundangan mengenai BPKP. Sedangkan kompetensi teknis terkait *job family* merupakan kompetensi pembeda untuk masing-masing *job family*. Seperti kompetensi lainnya, yang disyaratkan untuk kompetensi ini dibedakan sesuai dengan level dan jalur karir. Profil kompetensi tersebut merupakan acuan untuk menganalisis sejauh mana sumber daya manusia dalam BPKP memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Berdasarkan analisis tersebut BPKP dapat menentukan kompetensi mana yang masih perlu pengembangan dan kompetensi mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Mengembangkan Kompetensi Makro

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pelaksanaan pengawasan intern atas efektivitas penyelenggaraan program pembangunan tidak cukup hanya dengan mengukur apakah *output* yang dihasilkan telah sesuai, namun juga harus diukur apakah dampak yang dihasilkan sudah sesuai dengan harapan. Upaya ini tentu sejalan dengan ekspektasi dari Presiden dalam pidato saat pelantikan bulan Oktober lalu. Penguasaan kompetensi guna mengukur dampak tentu merupakan tantangan bagi auditor intern. Hal ini karena berbagai kompetensi terkait hal tersebut umumnya berada di luar area kompetensi dasar seorang auditor. Untuk itu, diperlukan suatu upaya berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi auditor, khususnya bagi kompetensi-kompetensi seputar kebijakan publik dan makroekonomi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi tersebut, sebagai langkah awal, BPKP menyelenggarakan *Workshop* “Evaluasi Kebijakan untuk Pengawasan Lintas Sektoral atas Program Prioritas Pembangunan



Foto
Eko

Nasional bagi para pegawai di lingkungan BPKP”.

Workshop dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi pertama dan kedua. *Workshop* yang diikuti oleh 25 orang peserta tersebut menghadirkan narasumber dari lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), dan The SMERU Research Institute. Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan oleh BPKP, di antaranya pengawasan internal yang dapat mengaitkan kontribusi strategi penguatan efektivitas SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP pada pencapaian tujuan program. “Selain itu, simpulan pengawasan diharapkan dapat mengaitkan capaian program pembangunan,” ujarnya. Ernadhi juga mengingatkan para peserta pentingnya perencanaan pengawasan yang integratif yang berfokus pada pengawalan program.

Materi yang dipaparkan antara lain *overview* mengenai *Impact Evaluation*, hal yang dinilai penting untuk mengetahui seberapa besar dampak dari sebuah program/kebijakan sehingga dapat menghindarkan kita dari proyek yang tidak efektif. Di samping itu, *Impact Evaluation* juga dapat memberikan akuntabilitas dan sebagai panduan dalam menjalankan program pemerintah.

Kemudian, juga disampaikan materi tentang perancangan evaluasi kebijakan, mulai dari *Theory of Change* (Teori Perubahan) hingga metode *Impact Evaluation*. Selain mendapatkan materi, para peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk merancang dan mendiskusikan pengawasan lintas sektoral dengan mengimplementasikan pengetahuan analisis dampak yang telah didapat. Ditutup oleh Direktur Pengembangan SDM dan Kebudayaan Iwan Taufiq Purwanto, Ia berpesan agar ke depannya informasi yang diperoleh para auditor dapat diolah dengan lebih baik dan lebih *concise*. “Pengetahuan yang didapat pada pelatihan ini akan bermanfaat bagi penerjemahan kebijakan pengawasan menjadi kebijakan teknis pengawasan di lingkungan kedeputan, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan perancangan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan terkait pengawasan lintas sektoral,” tutupnya.

Sekilas Sejarah Siskeudes, Sahabat Desa Akuntabel

Betrika Oktaresa

Foto
Betrika

Pengelolaan Keuangan Desa menjadi salah satu isu strategis pada Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Hal ini tercermin dari salah satu poin Nawa Cita, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, menjadi payung hukum bagi perangkat desa untuk mengelola Dana Desa. Tentu, mengelola dana tersebut bukanlah hal yang mudah, terutama bagi para perangkat desa yang belum akrab dengan pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Pun demikian jika dilihat dari sisi kompetensi para perangkat desa. Hal itu dibuktikan oleh survei yang dilakukan BPKP terhadap beberapa desa di lima provinsi pada tahun 2015. Hasilnya, sumber daya manusia perangkat desa masih sangat minim pengetahuannya tentang keuangan desa. Atas kondisi tersebut, merupakan hal yang wajar jika akhirnya berbagai pihak

menunjukkan *concern*-nya tentang pengelolaan Dana Desa tersebut.

Respon Cepat Mitigasi Gap

Pada Maret 2015, Komisi XI DPR RI saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPKP secara khusus membahas tentang pengelolaan Dana Desa. “Mohon pengelolaan alokasi Dana Desa ini menjadi perhatian BPKP, karena kami khawatir aparaturnya di desa tidak memiliki kemampuan. Setidaknya ada upaya dari pihak BPKP untuk mendorong para aparaturnya agar mampu mengelola Dana Desa secara tepat dan mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” imbuh Gus Irawan selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI kala itu. Atas harapan DPR RI tersebut, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan bahwa selama beberapa bulan terakhir, BPKP telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, sebagai contoh melakukan pemetaan risiko terhadap pengelolaan keuangan desa dan survei di beberapa desa. BPKP juga akan melakukan pengkajian pengelolaan keuangan desa, baik Dana Desa, pendapatan desa, utang desa, maupun aset kekayaan milik desa. Kemudian, BPKP juga telah menyusun petunjuk

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, bimbingan, konsultasi, dan melakukan persiapan internal pada seluruh Perwakilan BPKP di daerah. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh BPKP dalam mempersempit *gap* kompetensi perangkat desa adalah dengan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SimDes), dan telah melakukan uji coba pada desa-desa di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. “Kami berusaha agar aplikasi SimDes akan selesai dan dapat digunakan pada Juli 2015. BPKP juga tidak lupa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Pemerintah Daerah,” jelas Ardan ketika itu. Respon cepat BPKP tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban BPKP selaku pengawal akuntabilitas keuangan nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sesuai dengan janji Kepala BPKP pada saat RDP dengan Komisi XI DPR RI pada bulan Maret 2015, BPKP meluncurkan aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. *Launching* yang dilaksanakan di Auditorium Gandhi BPKP pada 13 Juli 2015, dihadiri oleh beberapa pejabat seperti Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi

Barat Anwar Adnan Saleh, dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi. Fadel Muhammad mengapresiasi inovasi BPKP tersebut. Menurutnya, aplikasi ini menjawab keresahan beberapa pihak mengenai dampak dari digelontorkannya dana yang berjumlah besar ke desa-desa. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengapresiasi peluncuran SIMDA Desa tersebut sebagai salah satu tahapan penting untuk mendukung pencapaian tujuan Dana Desa. “Hal ini tentunya menjadi langkah strategis yang perlu didukung sebagai langkah preventif terjadinya *fraud* sekaligus menjadi solusi untuk menstandarisasi pelaporan keuangan desa,” ujarnya. Dalam acara yang sama, Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengungkapkan bahwa dalam mengawal pengelolaan keuangan desa, BPKP tidak dapat terjun langsung ke seluruh desa. Oleh karena itu, BPKP membangun *tools* yang secara efektif dapat membantu pemerintah desa. Dengan digunakannya SIMDA Desa, maka dapat membantu aparatur desa dalam mengelola dan menghasilkan informasi keuangan desa yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada para pemangku kepentingan.

Dari SIMDA Desa menjadi Siskeudes

SIMDA Desa dibangun untuk menjawab keresahan berbagai kalangan tentang tuntutan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel. Melalui SIMDA Desa, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dicapai, antara lain: aplikasi SIMDA Desa telah dibangun sesuai dengan regulasi yang berlaku, SIMDA Desa mempermudah tata





kelola keuangan desa, SIMDA Desa telah dibangun dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan aplikasi (*user friendly*), dengan menggunakan aplikasi tersebut maka secara otomatis sudah terdapat *built-in internal control*, setelah di-*install* di masing-masing pemerintah desa, BPKP akan tetap memantaunya dengan memberikan kesinambungan *maintenance* aplikasi, dan BPKP memberikan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi untuk memudahkan pengguna.

Sebagai tindak lanjut atas peluncuran aplikasi tersebut, BPKP melakukan beberapa langkah sebagai implementasi penerapan aplikasi SIMDA Desa, salah satunya melakukan Diseminasi Tata Kelola Keuangan Desa dan aplikasi SIMDA Desa di kalangan internal BPKP. Kegiatan tersebut

ditujukan untuk memberikan pemahaman secara umum dan komprehensif kepada seluruh peserta dari seluruh perwakilan BPKP di 34 provinsi mengenai arah kebijakan pengelolaan keuangan desa, peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, dan pengoperasian teknis aplikasi SIMDA Desa. Setelahnya, seluruh perwakilan di setiap provinsi dapat langsung bergerak melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pada bulan Juli-Agustus 2015, BPKP terus berkoodinasi dan bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penjajakan kerjasama pengawalan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SIMDA Desa. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan pengujian, pada Rapat Pembahasan Aplikasi Keuangan Desa dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa

*Launching
Aplikasi Sistem
Tata Kelola
Keuangan
Desa (SIMDA
Desa)*

**Foto
Betrika**

(15/8/15), disepakati bahwa SIMDA Desa digunakan secara nasional dengan kesepakatan berupa penambahan modul Perencanaan di dalam aplikasi dan nama aplikasi SIMDA Desa diubah menjadi aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes).

Dorongan Implementasi Siskeudes

Pada bulan November di tahun yang sama, kerja sama tersebut diikuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dalam rangka pengawalan keuangan desa. Salah satu tindak lanjut dari MoU adalah Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 147/8350/BPD perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota yang menginstruksikan agar aplikasi Siskeudes yang diberikan secara cuma-cuma (tanpa dipungut biaya) dapat diterapkan kepada seluruh desa secara bertahap. Adapun percepatan pemanfaatan aplikasi tersebut, baik melalui sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa, dapat dilakukan dengan dukungan pembiayaan dari APBD.

Implementasi penggunaan Siskeudes semakin didorong melalui Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-7508/01 (16/08/2016) kepada para kepala desa di seluruh Indonesia perihal imbauan pengelolaan keuangan desa/Dana Desa, yang salah satunya mengimbau agar dapat memahami dengan baik dan

menggunakan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017, Presiden Jokowi menegaskan agar aplikasi Siskeudes dapat diterapkan bagi seluruh pemerintah desa di Indonesia.

Salah satu nilai lebih dari aplikasi Siskeudes adalah pembaruan yang berkelanjutan menyesuaikan dengan perubahan peraturan-perundangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, misalnya diperbarainya aplikasi Siskeudes rilis 1.05 yang menyesuaikan dengan PMK Nomor 225 Tahun 2016. Contoh lainnya, diterbitkannya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri 113 Tahun 2014 yang digunakan sebagai landasan utama penerapan aplikasi, disesuaikan dengan peluncuran aplikasi Siskeudes versi 2.0 pada 21 November 2018, yang didahului dengan pembentukan Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan SK Kemendagri nomor 900-05/2018. Pada implementasinya, aplikasi Siskeudes tidak hanya mencakup pengelolaan Dana Desa dari APBN saja, tetapi seluruh sumber pendapatan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Desa dari APBN, alokasi Dana Desa dari APBD Kab/Kota, bagi hasil pajak/retribusi dari APBD kab/kota, bantuan keuangan provinsi dari APBD provinsi, bantuan keuangan kab/kota dari APBD kab/kota, dan lain-lain pendapatan desa yang sah dari masyarakat/pihak III.

MAMASA, NEGERI DI ATAS AWAN TEMPAT LAHIR SISKEUDES

Ratna Wijihastuti

Pemandangan
yang ada di
Kabupaten
Mamasa,
Provinsi
Sulawesi Barat

Foto
Betrika

Kabupaten Mamasa merupakan sebuah daerah yang terletak di wilayah pegunungan Provinsi Sulawesi Barat. Mamasa merupakan daerah penghasil kopi Arabica kualitas terbaik di dunia. Salah satu faktor pendukungnya adalah letak geografis Mamasa yang sangat mendukung lahirnya kopi yang bercitarasa yahud. Dalam liputan khusus kali ini, Tim Warta Pengawasan akan menceritakan

kunjungan spesial kami di negeri di atas awan ini. Bukan tentang lahirnya kopi bercitarasa dunia, tetapi tentang lahirnya Siskeudes untuk Indonesia. Yuk, simak serunya cerita perjalanan kami.

Untuk menjangkau Kabupaten Mamasa, kami terbang dari Jakarta menuju Makassar, kemudian dilanjutkan penerbangan selanjutnya dari Makassar menuju Bandara Tampa Padang, Mamuju.

Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil kurang lebih selama 5 jam. Jalan berkelok dengan pemandangan pegunungan yang hijau dan aduhai, kadang berselimut awan putih bersih berarak di sisi kanan dan kiri, seakan menghilangkan kebosanan karena perjalanan yang cukup panjang.

Ketika pembaca bertanya, apa yang istimewa dari Mamasa hingga kami rela menjalani perjalanan yang cukup melelahkan ini? Kami punya jawabannya. Pada 9 Desember 2019 lalu, yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, diselenggarakan *event* penting dalam tahapan implementasi Siskeudes, yaitu *Workshop* Evaluasi Implementasi Siskeudes versi 2.0 dalam Tata Kelola Keuangan Desa, yang dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa se-Kabupaten Mamasa.

Mamasa dan Sejarah SIMDA Desa

Kegiatan ini menjadi bagian dari tonggak sejarah pengembangan Siskeudes, karena bertepatan dengan lima tahun implementasi SIMDA Desa yang kini telah bertransformasi menjadi Siskeudes. Tahun 2015 adalah awal dimulainya pengembangan aplikasi SIMDA desa. Pertama kali diuji coba di Kabupaten Mamasa, bertujuan untuk membantu aparat desa mengelola pertanggungjawaban keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Lima tahun lalu, Mamasa masih sulit dijangkau. Bayangkan, dulu Tim SIMDA Desa memerlukan tak kurang 10 jam berkendara lewat jalur darat dari Mamuju menuju Mamasa, karena memang fasilitas infrastruktur



jalan menuju Kabupaten Mamasa belum sebaik sekarang. Fasilitas listrik dan internet tentu masih terbatas. Di tempat inilah tim pengembang SIMDA Desa kala itu berjuang mengupayakan untuk diterapkannya aplikasi yang mampu membantu pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan semangat pengabdian dan ketekunan tim pengembang SIMDA

Foto
Betrika



Desa, di tengah keterbatasan fasilitas baik listrik maupun jaringan internet, serta didukung komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Mamasa, aplikasi SIMDA Desa yang merupakan cikal bakal Siskeudes, berhasil lahir dan diimplementasikan. Hingga akhirnya dalam kurun waktu lima tahun berjalan, aplikasi Siskeudes berhasil diimplementasikan di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, dari ujung barat sampai ujung timur. Semua itu dimulai dari negeri di atas awan ini, Mamasa.

Mamasa Bisa Membangun dari Desa

Tentu Pemerintah Daerah dan Masyarakat Mamasa patut berbangga, pencapaian tersebut tak lepas dari awal pengembangan SIMDA Desa di Kabupaten Mamasa. Bahkan Pemerintah Kabupaten Mamasa turut memetik hasil yang luar biasa, sebagaimana disampaikan oleh Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, dalam pembukaan *workshop* bahwa tahun 2013 saat Siskeudes belum diterapkan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa masih berpredikat *Disclaimer*. Semenjak diimplementasikannya aplikasi Siskeudes dan tentu diiringi dengan upaya yang tekun oleh seluruh aparat Pemerintah kabupaten Mamasa, 4 tahun berturut-turut Kabupaten Mamasa memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tim Warta Pengawasan sempat berbincang dengan Camat dan Kepala Desa yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut Abd. Rahman, Camat Mamasa, wilayah ibukota Kabupaten Mamasa, telah mengimplementasikan sejak awal,

saat uji coba SIMDA Desa tahun 2015. Hingga saat ini, 100% desa di wilayah kecamatan Mamasa telah mengimplementasikan Siskeudes. Sementara itu di Kecamatan Aralle, menurut Rachmad Amin, Camat Aralle, menyatakan bahwa mereka mulai mengimplementasikan Siskeudes pada awal tahun 2016. Saat ini 100% desa di wilayah Kecamatan Aralle telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun demikian, desa yang telah optimal mengimplementasikan Siskeudes baru sekitar 90%, sedangkan 10% lainnya masih terkendala jaringan internet sehingga saat laporan harus dikirimkan untuk dikompilasi tidak dapat dilakukan secara online.

Kedua camat tersebut bercerita bahwa keberhasilan implementasi Siskeudes di wilayah Mamasa selama ini tak lepas dari Komitmen Pimpinan dan jajaran Pemda Mamasa yang terus mendorong untuk mengimplementasikan Siskeudes. Dukungan diwujudkan antara lain melalui dukungan infrastruktur jaringan serta pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan desa dan bimbingan penggunaan aplikasi Siskeudes yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.

Selain camat, Warta Pengawasan juga berbincang dengan Kepala Desa yang hadir, mengenai pemanfaatan keuangan desa, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun sumber lain. Salmon, Kepala Desa Sampale Kecamatan Rantebulahan Timur menyatakan bahwa saat ini desanya

telah mengimplementasikan Siskeudes yang dijalankan oleh seorang operator yang cukup terlatih, sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa Sampale selalu bisa disajikan tepat waktu. Menurut Salmon sebelumnya laporan keuangan disusun secara manual, cukup rumit dan sulit, sehingga sering terjadi kesalahan. Dengan aplikasi, semua menjadi dimudahkan karena ada pedoman/panduan dalam aplikasi Siskeudes yang bisa diikuti dengan jelas. Di samping itu, bimbingan dari Pemerintah Kabupaten, baik dari Pendamping Desa maupun Inspektorat Kabupaten Mamasa terus dilakukan secara kontinyu. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sampale terutama untuk pembangunan infrastruktur Jalan, antara lain akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sebagian anggaran desa juga digunakan untuk program pembinaan PKK agar masyarakat lebih aktif meningkatkan ekonomi produktif serta sadar akan kesehatan.

Sementara itu Bernard D. Pasibang, Kades Uulusalu Indah, menyatakan sangat bersyukur dengan kehadiran Siskeudes yang memudahkan Pemerintah desa untuk membuat pertanggungjawaban dan melaporkan pengelolaan keuangan desanya, “terus terang desa kami sangat kekurangan SDM, dengan hadirnya aplikasi Siskeudes sangat membantu kami mengelola anggaran yang kurang lebih sebesar 806 juta pertahun”.

Menurut Bernard, faktor yang paling mendukung dari keberhasilan implementasi Siskeudes di Mamasa ini terutama adanya pelatihan

dan pendampingan yang intensif baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Inspektorat. Ia menjelaskan bahwa wilayahnya termasuk wilayah yang tertinggal, sehingga prioritas utama pemanfaatan keuangan desa adalah untuk optimalisasi Posyandu serta membangun jalan-jalan desa agar mobilitas penduduk lebih mudah. Akses jalan menuju Puskesmas Pembantu (Pustu) diperbaiki dengan menggunakan anggaran desa sehingga memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan. Di samping itu, Pemerintah Desa juga menggunakan anggaran desa untuk membangun fasilitas MCK dan penerangan listrik secara mandiri.

Sangat menarik, Wilayah Desa Uulusalu Indah merupakan wilayah yang cukup berlimpah sumber daya airnya. Pemerintah pernah memberikan bantuan dengan membangun fasilitas bangunan PLTA. Saat ini melalui BUMDes, PLTA dikelola secara mandiri dengan modal yang berasal dari Keuangan Desa Uulusalu Indah. Pengelolaan PLTA tersebut telah mejangkau seluruh wilayah Desa Uulusalu Indah dan mencapai daya 35.000 Kwh. Inilah salah satu bukti desa di Wilayah Mamasa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Akhirnya, melalui perjalanan ini dapat kita simpulkan bahwa jika pengelolaan keuangan desa tertata, transparan dan akuntabel, desa akan berkembang semakin maju. Jika Kabupaten Mamasa bisa, tentu wilayah lain di Indonesia pasti juga bisa. Jayalah Negeriku, Majulah Indonesiaku.

MENGAPA SISWASKEUDES?

Aplikasi sistem pengawasan keuangan desa (siswaskeudes) adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh apip sebagai tool pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan komputer.



Ilustrasi
Diana Pertiwi

Implementasi Aplikasi Siskeudes v2.0

Sampai dengan 30 November 2019





14 10 SPI HARUS GESIT DAN INOVATIF!

Membuka Diklat Kapabilitas Auditor SPI BUMN/D dan RSUD, Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto menyampaikan bahwa perubahan itu selalu ada. Menurutnya, seperti halnya perubahan peran dari auditor internal yang sebelumnya *watchdog* menjadi *consulting*, perubahan industri saat ini semuanya sudah serba teknologi. Untuk itu, auditor internal atau SPI juga harus selalu siap dan bisa mengikuti perubahan yang ada, dengan benar-benar memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan kapabilitas dalam mengawal perubahan yang sering terjadi, baik di lingkup eksternal maupun internal organisasi. SPI harus dapat menjadi mitra dan memberikan solusi atau memberikan respon yang cepat terhadap perubahan yang ada. SPI melihat apakah aturan-aturan yang ada saat ini di BUMN/D dan RSUD masih mendukung pencapaian tujuan atau tidak. Demikian sehingga SPI dapat memberikan masukan-masukan kepada direksi untuk melakukan perbaikan atau perubahan peraturan agar operasional berjalan dengan cepat, efisien dan efektif. Lebih lanjut disampaikan pada diklat yang berlangsung di Kantor Pengelola Diklat Provinsi Sulawesi Selatan ini bahwa keberadaan auditor internal harus bisa berperan sebagai konsultan. Auditor internal harus dapat memberikan inovasi-inovasi kepada bisnis inti yang dijalankan organisasi, untuk meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* masing-masing dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku saat itu.

PROMOSI DAN MUTASI, CIRI ORGANISASI DINAMIS

18
10



Sejumlah delapan belas pejabat yang terdiri dari eselon I, II, III, IV, widyaiswara utama, auditor utama, dan koordinator pengawasan (korwas) dilantik di Auditorium Gandhi oleh Pelaksana Tugas Kepala BPKP Iswan Elmi. Terdapat pergantian jabatan pimpinan tinggi BPKP, di antaranya Ernadhi Sudarmanto yang kini menjabat sebagai Sekretaris Utama BPKP, sebelumnya merupakan Deputy Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK. Selain itu, Dadang Kurnia melepaskan jabatan Sekretaris Utama BPKP dan menjadi Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD). Adapun Gatot Darmasto yang semula merupakan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan PPKD kini menjadi Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama dan Daryanto sebagai Pejabat Fungsional Auditor Ahli Utama. Pelantikan ini agar dimaknai untuk kebaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Terhadap kinerja pegawai dan pejabat BPKP akan dievaluasi secara terus menerus. Iswan menekankan kepada seluruh pejabat untuk melakukan pembinaan kepada SDM di unit kerja masing-masing agar senantiasa menjaga komitmen dan integritas untuk menciptakan organisasi yang sehat.

KAPABILITAS APIP, MATURITAS SPIP, DAN INTEGRITAS

18
10



Penghargaan atas pencapaian level 3 Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP diserahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala BPKP Iswan Elmi kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Ruang Rapat Menteri Luar Negeri, Kompleks Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI. Retno menyampaikan bahwa Kemenlu terus berkomitmen untuk meningkatkan level maturitas SPIP. Ia juga mengapresiasi seluruh unsur di lingkungan Kemenlu RI yang sangat berkomitmen terhadap pencapaian ini. Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja sama BPKP sehingga Kemenlu dapat memenuhi target RPJMN 2015-2019. BPKP berharap Kemenlu dapat menjaga pencapaian tersebut, bukan hanya sekadar

skor maturitas SPIP dan level Kapabilitas APIP, tetapi juga integritas yang perlu dibangun. SPIP dan Kapabilitas APIP harus didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto juga menyerahkan Laporan Hasil *Quality Assurance* atas Hasil *Self Assessment* Kapabilitas APIP Kemenlu kepada Inspektur Jenderal Kemenlu dan Laporan Hasil *Quality Assurance* atas Hasil *Self Assessment* Maturitas SPIP Kemenlu kepada Sekretaris Jenderal Kemenlu.

SINERGI BPKP DAN KOMITE IV DPD RI AWASI KEUANGAN DESA

04
11

Jakarta (4/11) - Untuk pertama kalinya, BPKP dan Komisi IV DPD RI menggelar rapat kerja membahas pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes. Rapat dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah



(PPKD) Dadang Kurnia beserta jajarannya. Terhadap pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh BPKP, Komite IV DPD RI menaruh perhatian besar dan mengapresiasi pelaksanaan tersebut. Hingga 25 Oktober 2019, capaian implementasi Siskeudes telah mencapai 92,09%. Dadang mengatakan bahwa dengan adanya aplikasi tersebut, aparat desa tidak perlu kesulitan memahami kompleksitas transaksi keuangan. Selain terintegrasi, Siskeudes dilengkapi *built in control* untuk mencegah penyimpangan. Petunjuk pelaksanaan implementasi manual juga dibuat untuk memudahkan penggunaannya. Ke depan, kesinambungan pengembangan dilakukan secara satu pintu di BPKP Pusat. Komite IV DPD RI dan BPKP sepakat untuk bersinergi dan akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang akan ditentukan kemudian.

PENGAWASAN PEMBANGUNAN KSPN PRIORITAS DANAU TOBA

Rapat Koordinasi Pengawasan Berkelanjutan atas Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba. Rapat dihadiri oleh Direktur Utama BPODT, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara. Pada rapat tersebut diperkenalkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nurdin. Satgas Pengawasan memiliki tugas melaksanakan pengawasan berkelanjutan atas kegiatan pembangunan KSPN Prioritas Danau Toba tahun 2019 sampai dengan 2021, yang terdiri dari pemantauan secara berkala dan/atau pengawasan lainnya yang bersifat insidentil.

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan

Pariwisata pada Kemenko Kemaritiman dan Investasi menjelaskan rencana aksi seperti, peningkatan kapasitas kelembagaan untuk fasilitasi ITMP, peningkatan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata, peningkatan partisipasi lokal dalam ekonomi pariwisata, dan mendorong lingkungan pendukung untuk investasi dan pengembangan bisnis pariwisata. Di samping itu, dijelaskan pula *key priority area*, antara lain Parapat Kec. Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun, Kec. Simanindo Kab. Samosir, Kec. Pangururan Kab. Samosir, dan Kec. Balige Kab. Toba Samosir. Total alokasi anggaran pembangunan atau pengembangan pelabuhan di KSPN Danau Toba Periode 2017-2020 sebanyak Rp480 Miliar. Pembangunan/ pengembangan kapal di KSPN Danau Toba yang telah terealisasi, yaitu KMP Ihan Batak.

05
11



Foto
Ichi Daroma

PIBR DAN APIP JAMAN KIWARI

BPKP bekerja sama dengan STAR BPKP dan Asian Development Bank (ADB) menyelenggarakan Seminar *Public Sector Internal Audit (PSIA)* dan Diseminasi Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) diselenggarakan pada tanggal 5-8 November 2019 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta. Dengan tema “*Towards Risk Culture Implementation to Enhance Government Risk Based Internal Audit*”, acara dihadiri oleh perwakilan APIP, baik dari kementerian/lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah. Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto menyampaikan tiga hal yang dapat dilakukan oleh APIP dalam menghadapi revolusi industri 4.0: (1) menciptakan nilai lebih melalui *strategic advisory services* untuk membantu manajemen puncak memastikan bahwa strateginya telah memperhitungkan risiko strategis, (2) melengkapi diri



dengan kompetensi dinamis yang relevan, dan (3) melakukan layanan pengawasan atau audit intern berdasarkan risiko, atau yang populer dikenal sebagai Pengawasan Intern/ Audit Internal Berbasis Risiko (PIBR/ RBIA). PIBR memfokuskan layanan pada masalah prioritas utama para *stakeholders*. Selain pemaparan materi dari narasumber, dilakukan pula *Coaching Clinic* oleh Tim Manajemen Risiko/PIBR BPKP kepada peserta dari K/L dan Pemerintah Daerah.

KEMENKUM HAM CAPAI LEVEL 3

Penerapan SPIP di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) sudah mencapai level 3. Menurut Pelaksana Tugas Kepala BPKP Iswan Elmi, hal ini menunjukkan sudah terbangunnya infrastruktur pengendalian dan implementasinya, serta hal tersebut telah terdokumentasikan dengan baik. Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan melalui suatu proses yang akuntabel sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan. Hasil QA atas penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP pada Kemenkum HAM Tahun 2018 menunjukkan bahwa Kemenkum HAM telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dengan nilai skor QA sebesar 3,3091, sedangkan penilaian atas Kapabilitas APIP pada level 3 penuh. Penghargaan juga diberikan kepada BPKP oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly atas pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.



Ilustrasi
Aska Wibianto

Bangun Tata Kelola Berbagi Pengetahuan melalui *Center of Excellence*

Rina Ramayani,
Kepala Subbagian Tata Laksana BPKP

Apa yang ada di benak anda ketika mendengar istilah *Center of Excellence (COE)*? Bukan sebuah istilah yang rumit, karena jika diterjemahkan secara langsung pun kita akan bisa membayangkan apa itu COE. *Excellence* jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti kualitas luar biasa atau sangat baik. Jika diartikan secara lengkap, COE berarti sebuah pusat yang memiliki kualitas yang sangat baik atau luar biasa. Tentang apa? Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang konteks dan kaitannya. Frost, Birkinshaw, dan Ensign (2002)

dalam jurnalnya yang berjudul “Centers of Excellence in Multinational Corporations” mendefinisikan COE sebagai unit organisasi yang telah dikenal sebagai sumber penciptaan produk baru dengan maksud untuk lebih mengembangkan keunggulan tersebut di luar proses bisnis organisasi. COE juga dapat didefinisikan sebuah sekumpulan ahli yang telah dikenal mempunyai keunggulan yang dapat memberikan nilai tambah dan diberikan kuasa untuk mengembangkan keunggulan tersebut di dalam organisasi untuk menjaga keberlangsungan keunggulan tersebut dalam proses bisnis organisasi (Moore, K. and Birkinshaw, J.M., 1998).

COE yang dibangun BPKP

Sejarah pengembangan COE di BPKP bermula dari penunjukkan BPKP oleh pemerintah RI sebagai *executing agency program State Accountability Revitalization (STAR)*. Pada program yang didanai melalui *loan* ADB tersebut, COE merupakan salah satu *output* yang dalam *Project Administration Manual (PAM)* disebutkan bahwa pembentukannya bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara BPKP dan pemerintah daerah melalui transfer pengetahuan dari BPKP sebagai auditor internal pemerintah pusat kepada auditor internal pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Langkah yang dilakukan oleh BPKP adalah dengan membangun COE auditor internal di delapan perguruan tinggi terpilih yang berstatus Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTBH), yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas

Hasanuddin, dan Institut Pertanian Bogor. Dua hal yang dipromosikan dalam pembentukan COE tersebut adalah praktik terbaik (*best practices*) audit internal dan kerja sama antara perguruan tinggi dalam menyediakan pelatihan manajemen keuangan negara.

Konsep COE BPKP

Pada tanggal 18 Juli 2017 telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BPKP dengan delapan perguruan tinggi dan enam belas Pemerintah Daerah. MoU tersebut menjadi tonggak terbentuknya *Center of Excellence* yang diinisiasi oleh BPKP. Konsep pengembangan ini sedikit berbeda dari beberapa COE di negara lain. BPKP mengembangkan konsep kolaborasi tiga pihak. Pihak pertama, yaitu BPKP sebagai tenaga ahli di bidang sistem pengendalian intern, pengawasan intern, dan keuangan negara. Pihak kedua, yaitu perguruan tinggi sebagai tenaga ahli di bidang metodologi riset. Pihak ketiga, yaitu pemerintah daerah sebagai penyedia kebutuhan dan target implementasi.

Pada delapan perguruan tinggi di atas, kegiatan yang dilaksanakan adalah percepatan pengembangan dan penyebaran praktik-praktik terbaik akuntabilitas keuangan dan pembangunan melalui kegiatan riset terapan, pengembangan metodologi, dan bentuk-bentuk diseminasinya. Secara teknis, COE menjadi media untuk mendapatkan inisiasi strategis dalam mendukung percepatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) – termasuk pencegahan *fraud*, yang merupakan komponen penting bagi membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel. Target-target yang ingin dicapai dari pembentukan COE adalah perbaikan proses bisnis pemerintahan/birokrasi, penyempurnaan *body of knowledge*, dan bahan masukan bagi kurikulum pendidikan tinggi terutama dalam materi akuntabilitas sektor publik.

Untuk memastikan keunggulan yang akan dikembangkan secara khusus, maka BPKP melakukan pengelompokan atas tema-tema yang akan dikerjakan oleh delapan perguruan tinggi sebagai berikut:

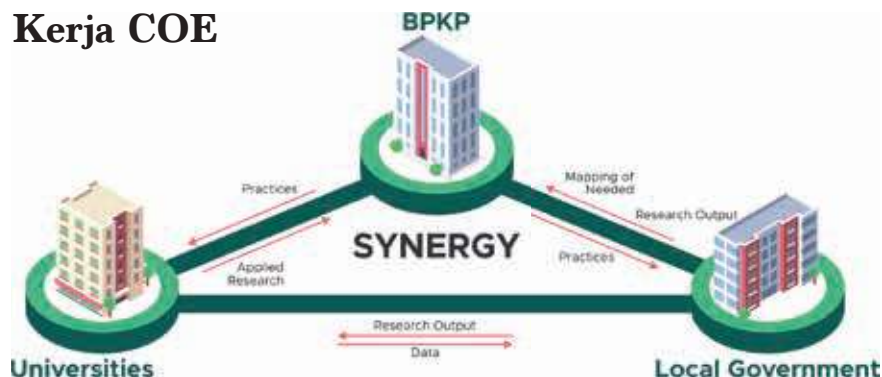
Pengelompokkan Bidang Unggulan

No	Bidang Keunggulan	Perguruan Tinggi
1.	Peningkatan Akuntabilitas	Universitas Gadjah Mada Universitas Airlangga
2.	Kapabilitas APIP	Universitas Indonesia Universitas Diponegoro Universitas Sumatera Utara
3.	Maturitas SPIP	Universitas Padjadjaran Institute Pertanian Bogor Universitas Hasanuddin

Pertanyaannya, bagaimana metode kerja kolaborasi ketiga pihak tersebut? BPKP sebagai pemilik kompetensi praktis di bidang akuntabilitas sektor publik, sistem pengendalian intern, dan sebagai pembina kapabilitas APIP melakukan seleksi atas tema-tema riset terapan yang diusulkan oleh perguruan tinggi berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional, serta pemetaan kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya pada pemerintah daerah. Riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi harus dapat menghasilkan produk atau *output* yang dapat menjadi solusi atas permasalahan praktis di lapangan, serta esensi kolaborasi antara praktisi dan akademisi adalah menghasilkan *output* aplikatif dan teruji secara akademis. Untuk menjamin mutu hasil kegiatan COE di Perguruan Tinggi, BPKP menunjuk Tim Reviu Substansi yang berasal dari internal BPKP. Tim Reviu terdiri dari para auditor senior yang sangat memahami teknis kegiatan pengawasan internal, khususnya terkait tiga

bidang unggulan, yaitu peningkatan akuntabilitas, kapabilitas APIP, dan maturitas SPIP. Secara periodik, hasil-hasil kegiatan seperti progres pelaksanaan riset dibahas oleh tim dari perguruan tinggi dan Tim Reviu Substansi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan *output* berupa praktik terbaik (*best practices*) di mana telah dilakukan sinergi antara teori yang dikuasai oleh Perguruan Tinggi dan praktik yang menjadi ranah BPKP sebagai praktisi. Selanjutnya, hasil riset didiseminasikan kepada pengguna, yaitu pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan agar hasil riset tersebut lebih aplikatif. Cara kerja COE yang dikembangkan oleh BPKP secara singkat terlihat pada gambar di bawah ini:

Cara Kerja COE



Keberhasilan Pengembangan *Center of Excellence*

Kegiatan COE telah diselenggarakan selama satu tahun mulai dari tahun 2017 hingga 2018, dengan masa efektif selama sepuluh bulan. Selama periode pelaksanaan tersebut, telah dihasilkan produk riset terapan berupa kebijakan, aplikasi, dan rekomendasi teknis. BPKP mensyaratkan kedelapan perguruan tinggi untuk mempublikasikan hasil riset pada jurnal yang berakreditasi nasional dan internasional. Salah satu hasil riset adalah konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah yang telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. COE juga menghasilkan aplikasi *monitoring* fiskal sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan daerah yang telah diujicoba pada Pemerintah Kabupaten Merauke, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Gorontalo. *Output* riset lainnya merupakan temuan-temuan hasil penelitian yang akan segera ditindaklanjuti. Untuk memperluas cakupan pengguna yang dapat memanfaatkan hasil riset COE, BPKP telah mengapitalisasi pengetahuan melalui penulisan ulang karya ilmiah menjadi esai populer. Hasil penulisan ulang ini diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul “Menuju *Center of Excellence*: Kapita Selekta Kajian Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara”. Melalui upaya-upaya tersebut, BPKP berharap agar pengetahuan yang dikembangkan memiliki dampak masif bagi seluruh insan pengawasan, baik praktisi maupun akademisi, dan masyarakat pada umumnya.

Keberlanjutan COE

Mengutip pidato Presiden Jokowi yang disampaikan pada Sidang Paripurna



Ilustrasi
Aska Wibianto

MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 bahwa dalam dunia yang penuh risiko, dinamis, dan sangat kompetitif, dibutuhkan cara-cara baru dan tugas birokrasi adalah menjamin agar manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat. Terkait hal tersebut, COE dapat menjadi suatu cara baru dalam mengembangkan pengendalian internal sektor publik dengan menghasilkan *output* yang siap untuk disampaikan kepada para pelaku sektor publik. Hasil riset terapan yang memang menyasar kepada kebutuhan riil di lapangan akan menghasilkan *tools* atau kebijakan yang berbasis kondisi sesungguhnya (*policy based evidence*).

Kata kunci dari COE sendiri adalah keunggulan yang menghasilkan inovasi. Dengan konsep kolaborasi yang diusung BPKP, keunggulan masing-masing pihak akan menghasilkan inovasi yang tidak hanya dihasilkan oleh praktisi, tapi didukung teori dan metodologi yang telah teruji. Kolaborasi memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Model pengembangan COE di BPKP sangat terbuka untuk didiskusikan bersama dan di antaranya masih banyak kelemahan untuk diperbaiki. Namun, dari kelemahan tersebut, COE dapat menjadi salah satu kekuatan BPKP di masa depan, yaitu untuk mengukuhkan peran sebagai salah satu aktor kunci dalam mengawal keberhasilan lima prioritas program pemerintah.

Masyarakat Risiko dan Implementasi Manajemen Risiko di Birokrasi

Mutia Rizal,

Pegawai BPKP yang sedang melaksanakan Tugas Belajar S3 di Universitas Gajah Mada



Ilustrasi
Diana Pertiwi

Masyarakat risiko, dijelaskan oleh Anthony Giddens dan Ulrich Beck, adalah masyarakat yang seluruh sendi kehidupannya dibangun di atas kesadaran akan risiko. Tentu saja bukan berarti kehidupan masyarakat semuanya berisiko, tapi kesadaran akan risiko dan bagaimana meresponnya, telah mewarnai dan memengaruhi seluruh proses sosial masyarakat. Menghindari makanan berlemak, menghindari lebih banyak gula saat minum, berhenti merokok, dan melakukan

berbagai kegiatan olah raga, adalah beberapa contoh kecil keseharian kita dalam masyarakat risiko. Masyarakat semakin mengutamakan keamanan, sehingga muncul terminologi risiko, yakni bahaya yang dapat dikalkulasi dan diantisipasi, yang kemudian mewujud dalam pengetahuan untuk memitigasinya, bernama manajemen risiko.

Manajemen Risiko Organisasi
Keberhasilan industrialisasi dan pesatnya pengetahuan yang disebut di atas pada akhirnya juga

menimbulkan efek bumerang bagi para pelakunya sendiri, khususnya pada perusahaan-perusahaan raksasa pelaku industri. Banyaknya kejadian menyimpang, kecurangan, hingga kolapsnya perusahaan-perusahaan besar tidak lagi dianggap sebagai bahaya yang tidak terantisipasi. Mereka tidak lagi cukup dengan hanya mengurus capaian *equity*, tetapi juga mesti memikirkan *safety*. Saat itulah manajemen risiko hadir, masuk untuk diadopsi oleh organisasi dalam menjamin keamanan, yang utamanya adalah keamanan bagi pemilik perusahaan. Berbagai macam potensi bahaya kemudian dikalkulasi, dan dengan teknik-teknik tertentu, berbagai ketidakpastian dihitung sehingga seolah menjadi suatu kepastian (*certain the uncertainties*).

Pada level tata kelola organisasi, negara (*state*) kemudian tak mau ketinggalan. Melalui birokrasinya, negara mengadopsi cara-cara mengalkulasi ketidakpastian untuk dipergunakan sebagai antisipasi terjadinya kecurangan dan kegagalan program/kegiatan di sektor pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat di birokrasi, yakni para birokrat dan seluruh perangkat lainnya, secara tak sadar telah terbawa masuk pada sebuah *society*, yakni masyarakat risiko, yang tentu saja memiliki sifat dan karakter tertentu yang berbeda dengan karakter masyarakat birokrasi sebelumnya.

Karakter Masyarakat Risiko

Masyarakat risiko yang hidup di era modern lanjut (dimulai abad 20), memiliki karakteristik yang tidak sama dengan masyarakat di era modern awal (abad 18 dan 19). Di era modern awal, ketimpangan kelas menjadi permasalahan utama

akibat pesatnya industrialisasi, seperti yang digaungkan oleh Marx. Kelas yang berada di bawah, yang memiliki keterbatasan akses produksi sehingga distribusi *equity* tidak merata, membentuk solidaritas untuk melawan kelas di atasnya. Namun kini, yang permasalahan utamanya adalah *safety*, solidaritasnya lebih bersifat lintas kelas. Muncul berbagai komunitas yang cair, karena diisi oleh anggota masyarakat lintas kelas, yang masing-masing ingin mengantisipasi agar risiko tidak terjadi pada komunitasnya.

Karakteristik anggota masyarakat risiko kemudian berubah menjadi individu yang memiliki tanggung jawab, yang oleh Beck disebut sebagai *responsible subject*, yakni individu yang memiliki sikap dan perilaku adaptif dan antisipatif untuk menghindari bahaya bagi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian banyak individu yang seolah memiliki kewajiban untuk mengingatkan individu lainnya dalam rangka menghindari bahaya yang mengancam dirinya dan komunitasnya. Namun, individu yang bertanggung jawab ini tidak muncul dengan sendirinya. Dia hanya akan muncul pada masyarakat yang memang permasalahan utamanya bukan lagi masalah konflik kelas. Dia hanya akan muncul pada masyarakat yang cair, yang minim kekangan, yang tidak lagi didominasi oleh ancaman.

Mengapa demikian? Karena individu yang bertanggung jawab memerlukan ruang yang cukup untuk melakukan refleksi diri agar menyadari risiko masing-masing. Selain itu, individu juga perlu menjadi seseorang yang diakui keberadaannya sebagai dirinya sendiri, bukan menjadi dirinya atas dasar paksaan atau ancaman. Dengan



Foto

Suryo Cahyo

demikian, masyarakat risiko pada dasarnya adalah masyarakat reflektif. Yang perlu diwaspadai, ada satu hal lagi yang perlu kita pahami bersama pada era modern lanjut ini, bahwa di saat keamanan (*safety*) dianggap sebagai suatu hal penting dan perlu diperhatikan, risiko ternyata bukan saja berguna untuk membuat individu menjadi individu yang bertanggung jawab. Namun, risiko justru dapat dijadikan sebagai alat politik bagi elite untuk mengatur masyarakatnya agar berperilaku mengikuti kehendak dan kepentingan elite, dengan mengatasnamakan keamanan (*intimidated risky society*).

Masyarakat Risiko di Birokrasi

Masyarakat risiko yang sejatinya telah terbentuk di organisasi, termasuk juga di birokrasi pemerintahan, sebaiknya mampu menjadi masyarakat risiko yang reflektif, sebagaimana karakteristik asli masyarakat risiko. Namun, seringkali tidak kita sadari bahwa masyarakat risiko yang terbentuk di birokrasi bukanlah masyarakat yang reflektif. Hal itu disebabkan oleh jebakan teknokratisasi dalam pengelolaan risiko di organisasi

birokrasi, ditambah dengan budaya paternalistik yang masih subur di birokrasi. Teknik-teknik manajemen risiko organisasi berupa metode untuk melakukan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko akan memunculkan para teknokrat yang dianggap ahli dalam mengelola risiko.

Keberadaan teknokrat yang seringkali muncul dalam wujud satuan tugas manajemen risiko di birokrasi, tidak jarang menjadi sebuah penegas kepakaran, yang memisahkan sekelompok individu yang merasa paham akan risiko dan berhak mengatur, dengan sekelompok individu lain yang dianggap tidak paham risiko yang menjadi sasaran pengaturan.

Di tangan para teknokrat inilah manajemen risiko dilakukan secara elitis. Menjadi semakin elitis saat jenis-jenis risiko, penyebab, dan responnya diputuskan oleh pimpinan organisasi. Dalam kondisi demikian, sumber risiko akan menumpuk di sekelompok individu yang dianggap tidak memiliki keahlian untuk mengelola risiko. Risiko mereka telah ditentukan sekaligus perilaku mereka telah ditetapkan untuk diatur sedemikian

rupa mengikuti hasil identifikasi teknokrat dan pimpinan. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk merefleksikan dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk mencari dan menemukan tanggung jawabnya, karena segala risiko, perilaku, dan tanggung jawabnya telah dilekatkan (*given*) secara elitis.

Untuk itu, birokrasi sebaiknya mulai mengalihfungsikan peran teknokrat manajemen risiko bukan sebagai ahli melakukan identifikasi dan mitigasi risiko, tetapi menjadi fasilitator bagi berbagai komunitas di organisasi birokrasi agar individu-individu mampu bersuara menyatakan risiko dan membuat kesepakatan di komunitasnya masing-masing. Karena itulah demokrasi di birokrasi pun hendaknya berubah dari partisipatif, demokrasi yang menggunakan keterwakilan, menjadi deliberatif, demokrasi yang mengutamakan konsensus bersama. Adapun komunitas dalam organisasi dapat dibentuk secara struktural maupun fungsional. Pada komunitas struktural, komunitas dapat dibentuk berdasarkan pada struktur organisasi yang ada, seperti misalnya bagian, bidang, divisi, atau sebutan lainnya. Sedangkan secara fungsional, komunitas akan berisi personil-personil yang memiliki fungsi sama dan lebih bersifat lintas hierarki struktur organisasi.

Tantangan Baru

Singkat cerita, tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam mengelola risiko kini telah berubah seiring terbentuknya masyarakat risiko di birokrasi. Tantangannya bukan lagi tentang bagaimana meyakinkan para individu menyadari perlunya

manajemen risiko, yang di dalamnya berisi tuntutan agar individu mau menerima risiko dan bersedia melakukan mitigasinya yang telah ditetapkan (oleh elite). Inti tantangan yang dihadapi kini adalah sejauh mana organisasi-organisasi di birokrasi mampu mengubah kondisi masyarakat birokrasi dari *intimidated risky society* menjadi *reflective risk society*.

Tantangan itu meliputi dua hal pokok, yakni, pertama, tantangan tentang kemampuan organisasi untuk menciptakan sebuah atmosfer yang lebih fleksibel, cair, dan tidak bersifat elitis untuk mendukung prasyarat terbentuknya masyarakat reflektif di birokrasi. Di dalamnya, tentu saja, perlunya pemahaman *tone at the top* dalam manajemen risiko yang bukan lagi berarti bahwa pimpinan hanya memberi arahan dan keteladanan dalam memitigasi risiko, akan tetapi juga bersedia menjadi sumber utama alias penyebab terjadinya risiko di organisasi.

Kedua, tantangan tentang kemampuan organisasi dalam mengelola konflik yang akan terjadi di antara komunitas risiko di organisasi. Hal itu mesti dimiliki oleh organisasi, karena bagaimanapun juga, berbagai komunitas tersebut nantinya akan saling menyadari risiko masing-masing dan berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk memitigasi, yang terkadang akan saling berbenturan di antara komunitas yang ada. Pada akhirnya, manajemen risiko di organisasi birokrasi bukanlah berarti organisasi harus sibuk mengelola dan memitigasi risiko, akan tetapi adalah bagaimana organisasi sibuk mengelola masyarakat risiko yang terbentuk di organisasi. Sekali lagi, Selamat datang di era masyarakat risiko!



“Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengajuan *Quality Assurance* kepada Rendal dalam rangka pembinaan penyelenggaraan maturitas SPIP?”

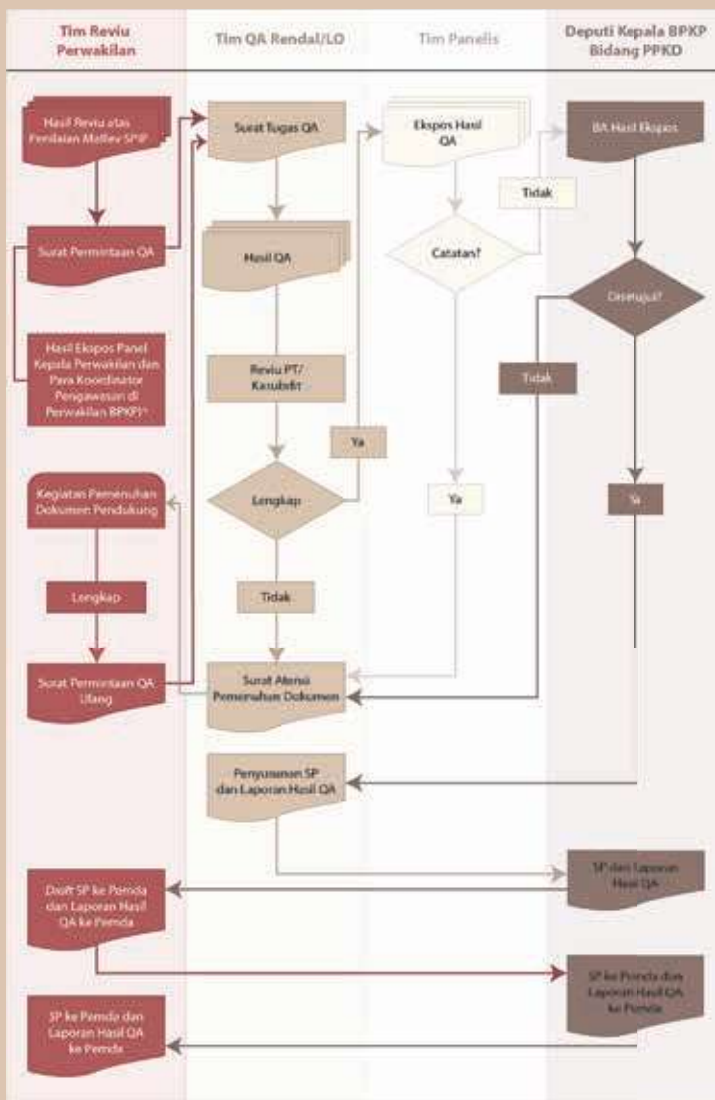
Jawaban

Sesuai dengan SE-06/D3/04/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penegasan Dokumen Pendukung Pengajuan Permintaan QA Penilaian Maturitas SPIP dan Permintaan Reviu atas QA PK APIP, serta Tindak Lanjut Surat Atensi Hasil QA/Reviu oleh Rendal, berikut adalah dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan QA kepada rendal:

1. Surat Permintaan QA kepada rendal;
2. Lampiran surat permintaan QA berupa dokumen pemenuhan daftar bukti pengujian per subunsur secara esensi dan keterkaitan (kertas kerja permintaan pra QA) dan *check list* kesiapan ekspose mandiri maturitas SPIP sebagaimana contoh yang terlampir dalam SE-06/D3/04/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penegasan Dokumen Pendukung Pengajuan Permintaan QA Penilaian Maturitas SPIP dan Permintaan Reviu atas QA PK APIP, serta Tindak Lanjut Surat Atensi Hasil QA/Reviu oleh Rendal;
3. Konsep laporan hasil QA/Penilaian kepada pemda yang telah melalui proses reviu Kepala Perwakilan BPKP dan *Routing Slip* sebagaimana diatur dalam SE Deputy Kepala Bidang PPKD Nomor 26 Tahun 2018 tentang Strategi Peningkatan Maturitas SPIP Level 3 Tahun 2018;
4. Bukti-bukti pendukung hasil penilaian maturitas sebagaimana diatur dalam Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP, SE Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penjelasan Teknis Parameter Pemenuhan Level Maturitas SPIP (Suplemen 1 Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016), dan SE Deputy Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 01 Tahun 2019 (Suplemen 2 Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016).

Jawaban

Secara umum proses penjaminan kualitas mengacu pada Peraturan Deputi PPKD Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjaminan Kualitas. Lebih lanjut, hal tersebut diatur dalam Lampiran 3 SE-06/D3/04/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penegasan Dokumen Pendukung Pengajuan Permintaan QA Penilaian Maturitas SPIP dan Permintaan Reviu atas QA PK APIP, serta Tindak Lanjut Surat Atensi Hasil QA/Reviu oleh Rendal. Berikut adalah prosedur penjaminan kualitas atas penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP pada Pemda di lingkungan Deputi PPKD.



“Bagaimanakah proses penjaminan kualitas atas penilaian penyelenggaraan maturitas SPIP pada Pemda di lingkungan Deputi PPKD?”



Ilustrasi
Petrus Sonny

BANGUN KAPABILITAS APIP DENGAN *MENTORSHIP*

Nur Ana Sejati,

Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

“One of the greatest values of mentors is the ability to see ahead what others cannot see and to help them navigate a course to their destination.” — John C. Maxwell

Dee W Hendersen menulis artikel berjudul *Enlightened Mentoring: A Characteristic of Public Management Professionalism*, yang diterbitkan pada tahun 1985. Artikel tersebut langsung membuat saya terpana sejak paragraf pertama. Henderson mengatakan bahwa *mentoring* tak bisa dilepaskan dari kata ‘Mentor’ yang merupakan salah satu tokoh dalam epos *the Odyssey* karya Homer kedua. Dalam karya sebelumnya, Homer berhasil menginspirasi Alexander the Great untuk menaklukkan dunia. *The Odyssey* merupakan

kisah kelanjutan bagaimana perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca yang juga merupakan pahlawan pada Perang Troya, yang memakan waktu hingga sepuluh tahun. Karya Homer ini mengisahkan Odysseus yang memiliki istri bernama Penelope dan seorang anak laki-laki, Telemachus.

Mentor adalah teman Odysseus. Dialah yang dipercaya oleh Odysseus untuk mendidik anak laki-lakinya, Telemachus. Dalam kisah tersebut, Mentor digambarkan sebagai laki-laki yang sudah tua dan biasa-biasa saja. Suatu ketika Dewi Athena, yang merupakan salah satu dewa dalam mitologi Yunani Kuno, menyamar sebagai Mentor dan membimbing Telemachus muda. Telemachus selanjutnya banyak belajar dari Mentor yang kelak di kemudian hari sangat berpengaruh terhadap caranya menghadapi tantangan. Telemachus inilah yang juga menjadi tokoh sentral dalam karya kedua Homer ini.

Mentorship di Sektor Publik

Dalam literatur manajemen, kajian tentang *mentorship* ini cukup banyak. Sayangnya, implementasi konsep ini di organisasi sektor publik masih sangat kurang digali, kecuali di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut Henderson, mentor mewujudkan dalam bentuk pelatih, pembimbing, guru, atau menjelma menjadi interaksi *one-on-one* antara mentor dan *mentee* dalam rangka membangun kepemimpinan. Menurut Henderson, *mentorship* dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk meraih kesuksesan. Menurutnya lagi, pada umumnya orang-orang yang mencapai kesuksesan tak bisa dilepaskan dari peran mentor. Hasil riset yang dilakukan oleh Wilder dan Guthmiller juga menunjukkan bahwa *mentoring*, yang merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam membangun *leadership*, juga memiliki peran yang krusial terhadap proses pengembangan pengetahuan dan metode kerja.

Meski demikian, Siemer (2000) dalam artikelnya yang berjudul *Public Administration Mentorship: Conceptual and Pragmatic Consideration* memberikan *warning* terhadap beberapa teknik *mentoring* klasik

yang sering dijumpai di sektor publik. Program *mentoring* yang sering didesain secara formalistik menjadi satu kebijakan dipandang tidak cukup efektif. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam proses *mentoring* semacam ini adalah adanya unsur keterpaksaan para mentor yang ditunjuk, evaluasi program *mentoring* tidak berjalan, *proteges* atau *mentee* tidak memiliki hak untuk memilih mentor, dan tujuan program tidak tersampaikan dengan baik. Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah interaksi antara mentor dan *mentee* yang terlalu singkat sehingga dalam banyak hal proses yang berjalan hanya sebatas penyampaian informasi.

Membangun APIP dengan Mentorship

Mentorship seperti apakah yang tepat untuk aparat pengawas internal pemerintah (APIP)? Pada dasarnya, *job character* atau jenis penugasan APIP sangat mendukung proses *mentorship* berjalan secara efektif. Penugasan yang dilaksanakan dengan pola kerja tim, yang sering dilakukan oleh APIP, secara langsung membentuk pola hubungan antara anggota tim dengan ketua tim, atau pun antara tim dengan pengendali teknis (dalnis). Pola hubungan semacam ini secara tidak langsung menempatkan pengendali teknis pada peran sebagai seorang mentor, ketua dan anggota tim sebagai *mentee*. Atau, ketua tim pun bisa berperan sebagai mentor bagi anggota tim. Meskipun tak harus selalu demikian, dalam beberapa hal anggota tim bisa saja menjadi *mentor*, misalnya dalam penguasaan IT untuk mendukung audit.

Interaksi yang intens selama penugasan bagi APIP, dari proses penyiapan surat tugas hingga penyusunan laporan memungkinkan tim untuk melakukan *knowledge sharing*. Bagi anggota tim, mereka secara langsung dapat menimba ilmu dari ketua tim yang memiliki pengalaman yang lebih. Ikatan kerja dalam sebuah surat penugasan setidaknya cukup menjadi faktor yang memaksa ketua tim untuk memerankan diri menjadi mentor yang mengarahkan kegiatan audit. Dalam hal ini, baik ketua tim atau pengendali teknis dengan peran sebagai mentor memiliki kepentingan agar penugasan dapat berjalan efektif sehingga, proses mengarahkan, membimbing, dan *me-review* harus dilakukan. Jika tidak, tentu akan berpengaruh pada kualitas hasil pengawasan. Belum lagi, tanggungjawab akibat kegagalan melakukan fungsi mentor bisa berakibat pada kegagalan penyelesaian tugas sesuai dengan standar, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap reputasi organisasi.

Di sisi lain anggota tim pun bisa meningkatkan kapasitas diri dan kemampuannya dari interaksi yang terbangun secara intensif dari proses perencanaan hingga pelaporan hasil audit. Hal ini senada dengan pendapat Rhys Andrews yang menyatakan bahwa interaksi dan hubungan antar anggota organisasi merupakan hal yang fundamental dalam menumbuhkan dan berbagi pengetahuan, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap kinerja organisasi.

Internalisasi Nilai dengan Efektif *Mentorship*

Interaksi yang intens selama penugasan tidak hanya memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, tapi juga nilai-nilai. Dalam hal ini proses pembentukan karakter bahkan dapat dilakukan di sini, meski tak selamanya harus dilakukan secara formal. Kebersamaan dalam penugasan, termasuk dalam perjalanan yang bisa jadi menempuh waktu berjam-jam ataupun ketika menikmati sarapan saat bertugas di luar kota, dapat menjadi sebuah *quality time* untuk berbagi informasi, pengetahuan, atau bahkan menanamkan nilai-nilai organisasi. Terjun secara langsung melakukan audit dengan ketua tim yang berperan sebagai *mentor* memungkinkan anggota tim untuk mengamati, belajar, dan mereplikasi apa yang telah pelajari selama penugasan. Hal yang sama juga terjadi dalam interaksi tim dengan dalnis. Sebaliknya, hal-hal yang negatif pun dapat ‘dipelajari’ dan ‘direplikasi’ oleh *mentee*.

Sama halnya dengan apa yang saya lakukan beberapa minggu lalu di mana saya justru banyak belajar dari anggota tim. Proses pembelajaran yang saya dapatkan secara terus-menerus saat kami berinteraksi memungkinkan saya untuk belajar menyelesaikan tugas secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, interaksi yang intens juga memungkinkan saya untuk mengamati sikap hidupnya dan mengambil pelajaran darinya.

Epilog

Karakter penugasan auditor pada prinsipnya sangat kondusif untuk mendukung berjalannya proses *mentorship* secara efektif. Ulasan di atas menunjukkan bahwa *mentorship* dapat menjadi media yang dapat meningkatkan kompetensi, membangun kohesivitas, menanamkan nilai-nilai organisasi, serta membentuk karakter auditor. Hal ini tentu harus menjadi kesadaran agar dalam membangun kapabilitas APIP juga mempertimbangkan aspek *mentorship*.



Mau Keren Bak Detektif? Yuk Ikut Sertifikasi ini

Ayu Isni Arum

Siapa sangka penguasa dunia hitam Chicago, pebisnis prostitusi, judi, penjualan alkohol, dan narkoba, Al Capone, justru masuk bui lewat tangan seorang Akuntan Frank J. Wilson. Pada tahun 1919, istilah akuntansi forensik memang belum lahir. Namun, definisi dari tugas akuntansi forensik sudah tergambar pada praktik-praktik yang dilakukan Wilson kala itu. Wilson berhasil menyeret Al Capone ke dalam jeruji besi atas dakwaan penghindaran pajak penghasilan dari aktivitas kriminal.

Ketika kasus Al Capone sedang *in* di Amerika Serikat, Negeri Paman Sam tersebut belum memiliki regulasi tentang pencucian uang. Kini, satu abad setelah Al Capone meniti karier hitamnya, pengendalian *fraud* semakin berkembang di seluruh dunia. Selain melalui penguatan regulasi, penguatan juga telah dilakukan dengan *Fraud Fighter* atau sumber daya manusia melalui

sertifikasi profesi spesialis *anti-fraud*. Pada edisi lalu, kita telah membahas tentang *Certified Forensic Auditor* (CFrA). Kali ini, kita akan mengupas sertifikasi *anti-fraud* lain, yaitu *Certified Fraud Examiner* (CFE).

Seorang CFE adalah spesialis dalam pencegahan dan pemberantasan fraud karena memiliki keahlian mumpuni dalam semua aspek *anti-fraud*, yaitu akuntansi dan auditing, kriminologi dan sosiologi, investigasi *fraud*, *loss prevention*, dan hukum. Yang berwenang mengeluarkan sertifikat CFE adalah *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), organisasi *anti-fraud* terbesar di dunia yang berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat dan memiliki perwakilan atau *local chapter* di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Sebelum mengikuti sertifikasi CFE, calon peserta diwajibkan menjadi *Associate Member* ACFE. Pada tahun 2019, jumlah anggota ACFE tercatat lebih dari 80.000 orang yang tersebar di lebih dari 179 negara.

Sebelum lanjut ke pembahasan lebih mendalam, Pembaca wajib mengetahui tiga jenis keanggotaan di ACFE Indonesia Chapter. Pertama, *CFE Member*, yaitu keanggotaan bagi pemegang sertifikat CFE. Kedua, *Associate Member*, diperuntukkan bagi Pembaca yang tertarik mendalami program-program *anti-fraud*, tapi belum atau tidak mengikuti ujian sertifikasi CFE. Keanggotaan *Associate Member* ini juga diakui oleh ACFE global. Terakhir, *Affiliate Member*, yaitu keanggotaan di ACFE Indonesia Chapter. Selain persyaratan dari sisi keanggotaan, calon peserta sertifikasi CFE juga harus memenuhi persyaratan akademis dan profesional, serta persyaratan karakter.

Persyaratan akademis mengatur pendidikan minimal peserta CFE, yaitu setingkat sarjana atau setara. Namun, jika peserta belum mencapai syarat minimal pendidikan, tidak perlu khawatir. Dengan persetujuan ACFE Internasional, peserta dapat menyubstitusikan kekurangan studi akademisnya dengan pengalaman profesional yang berhubungan dengan *fraud*, di mana perhitungan satu tahun studi disubstitusi dengan dua tahun pengalaman profesional.

Pada syarat pengalaman profesional, peserta diharuskan telah bekerja secara penuh (*full-time*) dalam posisi yang berkontribusi terhadap pencegahan dan deteksi *fraud*. Dewan ACFE yang terdiri dari anggota-anggota paling berpengalaman di ACFE atau disebut sebagai *The Board of Regents* ACFE telah menetapkan lima bidang pekerjaan yang akan dipertimbangkan sebagai pengalaman profesional, yaitu akuntansi dan auditing, kriminologi dan sosiologi,

investigasi *fraud*, *loss prevention*, dan hukum.

Untuk menjamin peserta memiliki moralitas yang baik, ACFE juga mensyaratkan adanya CFE *Candidate Recommendation Forms*, yaitu rekomendasi tertulis dari rekan profesional peserta yang berisi uraian tentang hubungan kerja dan pendapatnya mengenai pemahaman profesional, karakter, sifat, integritas, dan keahlian calon peserta, serta alasan mengapa merekomendasikan sebagai peserta CFE. ACFE Indonesia Chapter membuka





Ilustrasi
Diana Pertiwi

kesempatan *preparation* selama lima hari bagi calon peserta CFE dengan bimbingan dan latihan soal dari materi ujian ACFE Internasional. Ujian ACFE meliputi 500 soal terkait *Prevention and Deterrence*, *Financial Transactions and Fraud Schemes*, *Investigation* serta *Law*.

Fraud Prevention and Deterrence adalah pengujian tentang penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan *fraud* dan bagaimana cara mencegahnya. Pokok bahasannya meliputi penyebab *crime*, *white-collar crime*, *occupational fraud*, pencegahan

fraud, penilaian risiko *fraud*, serta *the ACFE Code of Personal Ethics*.

Financial Transactions and Fraud Schemes adalah pengujian tentang jenis-jenis kecurangan transaksi keuangan. Pokok bahasannya, terdiri dari dasar-dasar Akuntansi dan Audit, *fraud schemes*, pengendalian intern, serta materi-materi audit dan akuntansi lainnya.

Investigation Process menguji kemampuan peserta dalam melakukan wawancara, pembuatan pernyataan, mendapatkan informasi dari publik, penelusuran transaksi mencurigakan, evaluasi kecurangan, dan penulisan laporan.

Law menguji pengetahuan peserta tentang akibat hukum, pelaksanaan pengujian terhadap *fraud*, termasuk hukum sipil, jenis-jenis bukti, serta hak-hak tersangka dan saksi. Ujian sertifikasi CFE diawasi langsung oleh *witness* yang merupakan anggota ACFE Indonesia Chapter yang sudah bersertifikasi CFE. Ujian sertifikasi dapat dilakukan selama satu atau dua hari, tergantung pada kemampuan peserta. Kesempatan mengulang ujian untuk subjek tertentu juga diberikan kepada peserta yang belum lulus ujian, dengan maksimal hingga dua kali pengulangan. Jika setelah tiga kali pengulangan peserta masih gagal, maka ia diharuskan untuk mengulang seluruh subjek ujian.

Setelah membaca tulisan tentang CFE ini, mungkin Pembaca langsung terbayang karakter-karakter fiktif detektif yang kemampuan investigasinya mumpuni dan mampu berpikir layaknya pencuri (*think like a thief*). Bagaimana Pembaca, tertarik untuk mengikuti sertifikasi CFE?

**Pertanyaan:**

Selamat Siang, salah satu APIP di Sulsel menanyakan perihal pegawai di Inspektorat-nya yang sudah lulus *Inpassing*, lalu Persetujuan Teknis (Pertek) *Inpassing*-nya telah kadaluwarsa/mati, namun tetap dilantik, karena ada miskomunikasi di Pemda.

Inspektorat baru saja berencana mengajukan perpanjangan Pertek yang kadaluwarsa tersebut, tetapi ternyata terlanjur dilantik. Mohon penjelasan, apa langkah yg harus dilakukan inspektorat selanjutnya? Terima kasih.

Tsalits, Makassar

Jawaban:

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2019, masa berlaku persetujuan teknis *Inpassing* 2017-2018 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Pengangkatan yang dilakukan oleh Pemda sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salam,
Kapusbin JFA, Edi Mulia

Pertanyaan:

Salam Hormat...

Saya diangkat menjadi Auditor Pertama dengan pangkat dan golongan III/b (TMT 1 April 2014) melalui jalur *Inpassing* dan sesuai Surat Keputusan Kepala Daerah pada bulan November 2017. Semenjak diangkat menjadi Auditor Pertama pada November 2017 hingga Juni 2019, saya telah memiliki angka kredit 200 dengan subunsur yang telah terpenuhi sesuai ketentuan angka kredit pada Permenpan No 220 Tahun 2008. Namun, saya tidak pernah mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Muda. Saya telah 5 tahun berada di pangkat III/b dan 2 tahun di jabatan Auditor Pertama. Walaupun saya mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Muda pada tahun 2020 dengan jadwal ujian tercepat di bulan Juni, sedangkan aturan BKD paling lambat memasukkan usulan permohonan naik pangkat bulan Juni di tahun berkenaan. Demikian kemungkinan besar saya tidak bisa mengejar naik pangkat di tahun 2020, melainkan pada periode April 2021 yang artinya saya menjabat Auditor Pertama selama 4 tahun dengan pangkat/golongan III/b selama 7 tahun.

Pertanyaan saya adalah:

1. Apakah saya akan diberikan sanksi dibebaskan sementara dari jabatan Auditor Pertama tersebut?
 2. Bagaimana saya bisa mendapatkan solusi atas pangkat dan jabatan saya ini sehingga saya tidak dikenakan sanksi?
- Terimakasih.

Lodwyk Pakpahan

Jawaban:

1. Atas pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
Sesuai Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan bahwa ketentuan pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak ada lagi ketentuan pembebasan sementara bagi JFA karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
2. Kami sarankan untuk segera melakukan registrasi *online* Diklat Penjurusan Auditor Muda. Pendaftaran diklat tersebut dapat dilakukan setiap saat. Perlu kami informasikan, bahwa saat ini calon peserta diklat penjurusan Auditor Muda untuk Tahun 2019 ini masih terbuka sehingga tidak perlu menunggu sampai dengan tahun 2020. Ujian Sertifikasi Auditor (USA) dapat dilakukan secara langsung setelah selesai mengikuti diklat melalui USA berbasis komputer atau metode ujian yang lain. Auditor yang tidak dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam waktu 5 tahun karena belum mengikuti diklat tidak dikenakan sanksi, namun tetap diwajibkan untuk mengumpulkan angka kredit pemeliharaan.

**Salam,
Kapusbin JFA, Edi Mulia**

Pertanyaan:

Saya bekerja di Subbagian Keuangan mulai 13 April 2014 sampai sekarang. Apakah bisa menjadi auditor melalui jalur *Inpassing*?

**Hujaipah
Ketapang**

Jawaban:

Salah satu persyaratan bagi PNS yang akan mengikuti pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian (*Inpassing*) adalah memiliki pengalaman tugas di bidang JFA di lingkungan APIP paling kurang 2 tahun. Tugas di subbagian



keuangan tidak termasuk dalam tugas di bidang JFA. Syarat lainnya dapat dilihat dalam Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2019.

Salam,
Kapusbin JFA, Edi Mulia

Pertanyaan:

Saya adalah auditor yang diangkat melalui jalur *Inpassing* pada tahun 2018. Sesuai kalender diklat di bulan Oktober dan November 2019, akan ada pelaksanaan Diklat Penjenjangan Auditor Madya. Pertanyaannya, apakah saya yang diangkat melalui jalur *Inpassing* ini dengan angka kredit 665 dan golongan IV/b dapat mengikuti kegiatan diklat tersebut? Mohon penjelasan dan terima kasih.

Maria Veronica IM Gelo Lodo
Bajawa

Jawaban:

Salah satu syarat untuk diangkat dalam JFA adalah memiliki sertifikat sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya. Untuk pengangkatan dalam JFA melalui penyesuaian (*Inpassing*), sertifikat auditor diberikan setelah PNS tersebut lulus uji kompetensi sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki. Dengan demikian, bagi PNS yang diangkat dalam JFA melalui penyesuaian (*Inpassing*), tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya. Namun apabila masih dianggap perlu, Auditor Madya tersebut diperbolehkan mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya sepanjang masih terdapat kelas, namun tidak menjadi prioritas dalam penetapan peserta.

Salam,
Kapusbin JFA, Edi Mulia

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah Pak Edi Mulia dan Pak Djoko Prihardono. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke warta_pengawasan@bpkp.go.id atau redaksi Warta Pengawasan.



MEMBANGUN INDONESIA DARI DESA

Supriyanti,
Kepala Desa Bandung Jaya, Kepahiang, Provinsi Bengkulu

"Desa itu selalu berada dalam pikiran dan hati saya. Bukan karena saya berasal dari desa, bukan itu saja. Tapi menurut saya, membangun desa artinya membangun Indonesia," Presiden RI Joko Widodo

Kalimat di atas disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada silaturahmi pemerintah desa se-Indonesia di Tennis Indoor Senayan, GBK, 10 April 2019. Dari kutipan Presiden tersebut kita dapat memahami arti penting desa bagi kemajuan bangsa dan negara kita saat ini. Desa diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dan menjadi benteng pertahanan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika semangat membangun desa sama artinya dengan semangat membangun Indonesia.

Pada edisi kali ini, Warta Pengawasan akan bercerita tentang sosok inspirasi yang tinggal di suatu desa kecil berjarak hampir 1000 km dari ibukota Indonesia, Jakarta, bernama Bandung Jaya. Desa yang terletak

di Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu tersebut perlahan mulai merasakan manisnya pembangunan desa yang diprogramkan oleh pemerintah sehingga pernyataan *"kalau mau sukses dan kaya harus merantau ke kota"* mulai ditinggalkan. Sosok itu adalah Supriyanti, seorang wanita sederhana yang berperan di balik kesuksesan pembangunan Desa Bandung Jaya. Lahir di Pagar Alam pada 13 Desember 1979, Ia dipercaya menjadi Kepala Desa Bandung Jaya sejak 2015 melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Desa Bandung Jaya dapat memaksimalkan sumber daya yang ada menjadi sebuah desa yang mandiri dan maju.

Anak ke-5 dari pasangan Sugandi dan Waginem ini telah belajar hidup mandiri

sejak kecil, menjalani apa yang telah ditanamkan sang ibu, yang merupakan pedagang keliling. Sejak kelas 3 Sekolah Dasar, Ia telah mulai berjualan tempe, cendol, buah, dan sayuran dengan cara berkeliling. Ia tidak pernah malu dan tidak merasa terpaksa saat berjualan, justru Ia menjalaninya dengan rasa riang. Bekal kehidupan itulah yang malah membawanya berhasil menjadi seorang pemimpin yang berdaya juang.

Kunci keberhasilan Supriyanti adalah penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan potensi desa dan diimbangi dengan transparansi dalam penggunaannya. Ia menceritakan di awal kepemimpinannya, Ia mendatangi warga dari setiap dusun yang ada di desanya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Selain itu, Ia membuka usulan masyarakat tentang apa yang perlu dibangun di desanya. Setelahnya, usulan-usulan tersebut akan dikelompokkan dan disusun menjadi RPJMDesa dan RKPDesa, juga dengan melibatkan aparat pengawas desa dalam proses tersebut. Dalam implementasinya, Ia menjelaskan prinsip yang selalu ditanamkan, yaitu niat baik dan jujur serta saling percaya untuk menghormati dan saling menghargai.



Kunjungan Kepala Desa Bandung Jaya ke Kantor BPKP Pusat dan bertemu dengan Deputi PPKD

Kunjungan kerja Deputi Bidang PPKD BPKP ke desa Bandung Jaya, Kepahiang, Provinsi Bengkulu



Seminar Nasional HUT ke-62 IAI

Foto
Dok. Kominfo
BPKP

Jadi, di setiap proses yang dijalankan dilandasi atas rasa saling percaya, saling menghormati dan menghargai. Kepala Desa itu juga selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa *“walaupun dari bawah, dari desa, kita ingin mewujudkan Indonesia lebih maju.”*

Jika kita berkunjung ke Desa Bandung Jaya dari Bengkulu, kita akan melewati perkebunan teh Kabawetan. Perkebunan teh yang sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda ini sekarang telah disulap menjadi lokasi wisata yang *instagramable* oleh pemerintah daerah sebagai pengelolanya. Pengunjung akan dimanjakan dengan beberapa titik foto yang pastinya dapat menghasilkan foto yang indah dan

menarik. Pengunjung dapat berfoto di kebun teh yang luas dengan latar belakang bukit hijau dan langit biru cerah yang dihiasi dengan awan yang cantik.

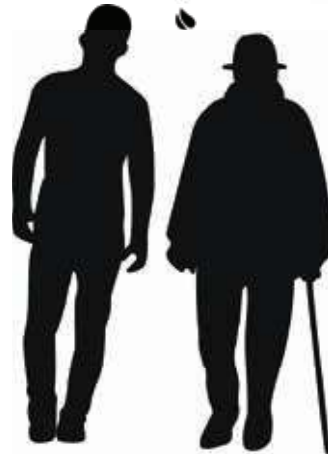
Selain itu, di Desa Bandung Jaya terdapat juga wisata alam yaitu Air Terjun Moro Seneng. Derasnya air yang mengalir dari dataran tinggi sangat menarik perhatian. Bekerjasama dengan Kelompok Tani Luak Hitam dan BUMDes Giri Artha, Desa Bandung Jaya telah menghasilkan produk kopi unggulan yaitu *“BAJA COFFEE”*. Pada aspek pembangunan SDM di desa, Supriyanti memahami betul pentingnya pendidikan yang baik bagi generasi muda yang ada di desanya. Memanfaatkan Dana Desa, mulai dibangun tempat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga setiap anak di desa Bandung Jaya dapat mendapatkan pendidikan yang baik sejak dini. Dalam penutup ceritanya, Supriyanti menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem yang menurut Supriyanti sangat membantunya bersama aparat desa dalam mengelola desa, yaitu Siskeudes. Ia menjelaskan bahwa berkat sistem tersebut tata kelola keuangan desa dapat lebih mudah dilaksanakan sehingga ia tidak lagi menemui kendala-kendala dalam mengelola keuangan desa, dan bisa berfokus pada pemanfaatan Dana Desa guna mewujudkan kesejahteraan di desanya, Bandung Jaya.

Surjo Cahyo Putro

SELASA BERSAMA MORRIE

Yuni Dwi Yuliani



Ilustrasi
Viana A

“Morrie tahu ia jadi korban nasib yang tak ada alasannya. Yang menarik ialah bahwa ia tak memilih untuk menjadi marah dan membuat orang lain jadi korban. Harapan, baginya, ialah ketika ia memberi. Mungkin dengan sedih dan getir dan rapuh. Tapi akhirnya ia memberitahu: tetap saja ada orang yang berbuat baik, juga dalam kekalahannya. Bukankah itu juga harapan?” – Goenawan Muhamad dalam “Harapan”, Catatan Pinggir, Tempo.

Pernahkan Anda mempunyai seorang guru sejati? Orang yang melihat Anda sebagai batu berharga yang belum diolah, sebuah berlian yang kearifannya dapat digosok sampai berkilauan? Apabila Anda cukup beruntung dapat menemukan jalan menuju guru semacam itu, Anda akan selalu tahu jalan pulang. Mitch Albom cukup beruntung memiliki guru sejati yang dipanggilnya *Coach*. Orang itu adalah Morrie Schwartz, seorang mahaguru yang pernah menjadi

dosennya hampir dua puluh tahun yang lalu. Morrie adalah profesor favorit Mitch di Brandeis University di kota Waltham, Massachussets. Di hari kelulusannya, Mitch berjanji pada profesornya untuk terus berhubungan dengannya, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Mitch tak mampu menepatinya.

Namun, Mitch mendapatkan kesempatan kedua untuk bisa menepati janjinya. Suatu keajaiban telah mempertemukannya kembali dengan Morrie pada bulan-bulan terakhir hidupnya. Profesor tua penggemar dansa itu terserang ALS, penyakit ganas yang menyerang sistem saraf. *Apakah aku akan menyerah dan mati begitu saja, atau akan memanfaatkan sisa waktuku sebaik-baiknya?* tanya Morrie kepada dirinya sendiri. Morrie takkan menyerah. Ia tak berkecil hati karena ajal akan segera menjemputnya. Sebaliknya, Ia menjadikan kematian sebagai proyek akhirnya, kuliahnya

yang terakhir, pusat perhatiannya selama hari-hari yang masih tersisa.

Setelah enam belas tahun tidak bertemu, keakraban yang segera hidup kembali di antara guru dan murid itu sekaligus menjadi sebuah “kuliah” akhir: kuliah tentang cara menjalani hidup. Kuliah itu diadakan sekali sepekan, setiap hari Selasa dirumah sang profesornya. Apa yang kali ini diajarkan oleh sang profesor kepada Mitch? Di sinilah daya tarik yang bisa pembaca nikmati di buku ini. Banyak sekali kata-kata bijaksana dalam buku ini, salah satunya adalah saat Ted Koppel seorang pembawa acara “*Nightlife*” bertanya pada Morrie mengenai hal apa yang ingin disampaikan kepada seluruh dunia. Morrie berkata, *bangun semangat kasih, dan bertanggungjawablah satu sama lain. Andaikata kita dapat menguasai pelajaran ini, yakinlah bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi?* Selamat membaca.

Judul:
Tuesdays with Morrie
(Selasa Bersama Morrie)
Pengarang:
Mitch Albom
Penerbit:
Doubleday
Tahun terbit:
1997
Dimensi:
192 halaman



*"I didn't choose the skuxx life,
the skuxx life choose me.."*

– Ricky Baker

PETUALANGAN SERIMBA

Gilang Rahmat Hastanto

Jika setelah menyaksikan film *Joker* (2019) kemudian kita percaya bahwa orang jahat bisa lahir dari orang baik yang tersakiti, maka anak baik tentu juga bisa lahir dari anak nakal yang disayangi. Itulah yang terjadi pada Ricky Baker (Julian Dennison), si pembuat onar. Mengutip Paula Hall (Rachel House), petugas dari *Ministry of Child Welfare*, Ricky Baker adalah *"a real bad egg"*. Kenakalan Ricky meliputi (namun tidak terbatas pada) melanggar aturan, mencuri, meludah sembarangan, melarikan diri, melemparkan batu, menendangi benda-benda, merusak benda-benda, membakar benda-benda, berkeliaran dan mencoret-coret tembok. Bukan anak angkat idaman, tentunya.

Meskipun begitu, Bella Faulkner (Rima Te Wiata) tetap bersedia mengadopsinya. Ricky yang ogah-ogahan diadopsi terpaksa menurut karena tidak ada pilihan yang lebih baik baginya. Perlahan, kasih sayang Bella berhasil meluluhkan hati Ricky dan membuatnya merasa memiliki rumah. Hec (Sam Neill), suami Bella, meskipun tidak terbiasa dan canggung berhadapan dengan anak-anak, juga bersedia menerima Ricky dalam rumah pedesaan mereka. Namun, keadaan tiba-tiba berubah. Hec tidak punya pilihan lain dan

berencana mengembalikan Ricky ke Paula. Ricky, yang sudah jauh lebih baik dan bahagia, tentu tidak terima. Dia malah lebih memilih kabur ke dalam belukar. Padahal, jangkauan saja awalnya sangat menjemukan bagi Ricky yang terbiasa dengan kehidupan perkotaan. Wajar saja bila akhirnya Ricky tersesat. Hec mencari Ricky dan berniat membantunya keluar dari hutan. Sialnya, keadaan malah menjadi kacau karena satu dan lain hal sehingga memaksa perjalanan mereka menjadi lebih lama.

Keadaan bertambah pelik ketika Paula yang salah paham mengira Hec menculik Ricky ke rimba. Ia mengerahkan pihak yang berwajib dalam pencariannya. Hadiah pun ditawarkan bagi siapapun yang menemukan mereka. Akibatnya, mereka menjadi buronan terkenal dan hilangnya mereka menjadi sensasi nasional. Klimaksnya adalah adegan kejar-kejaran epik penuh kekacauan yang terlalu menggelikan untuk hanya sekedar diceritakan. Pembaca harus menontonnya sendiri agar bisa lebih menikmatinya.

Sepanjang film, pemirsa akan disuguhkan dengan humor-humor ringan yang unik dari Hec, Ricky dan orang-orang yang terlibat dalam



petualangan mereka. Kepolosan dan antusiasme Ricky merupakan antitesis bagi Hec yang kaku dan dingin. Hubungan mereka yang kompleks ditunjukkan dengan baik oleh akting prima Sam Neill dan Julian Dennison. Selain humor, film ini juga memiliki bagian-bagian lain yang mampu mengaduk-aduk perasaan kita. Semua ini menjadi kekuatan film ini hingga berhasil melambungkan nama Taika Waititi (*Thor: Ragnarok*, *Jojo Rabbit*) dan menjadi film lokal Selandia Baru dengan rekor pendapatan terbesar hingga saat ini. Film ini tayang perdana pada *Sundance Festival 2016* dengan memperoleh *critical acclaim*. Keberhasilan film ini juga melejitkan karir Julian Dennison yang semakin terkenal setelah perannya di film *Deadpool 2*.

Petualangan Hec dan Ricky di alam bebas Selandia Baru yang “*majestic*” akan menggelitik imajinasi kanak-kanak kita. Inilah salah satu daya tarik film ini. Anak mana yang tidak pernah berandai-andai bisa berpetualang menemukan hal-hal

Judul **Hunt for the Wilderpeople**
 Tanggal Rilis **31 Maret 2016 (Selandia Baru)**
 Negara Asal **Selandia Baru**
 Sutradara **Taika Waititi**
 Produser **Carthew Neal, Matt Noonan, Leanne Saunders, Taika Waititi**
 Penulis Naskah **Taika Waititi**, berdasarkan buku “*Wild Pork and Watercress*” karya Barry Crump
 Pemain **Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata, Rachel House, Rhys Darby**.
 Musik **Lukasz Buda, Samuel Scott, Conrad Wedde**
 Sinematografi **Lachlan Milne**
 Editor **Luke Haigh, Tom Eagles, Yana Gorskaya**
 Durasi **101 Menit**

baru dan menarik? Karena itulah, penulis merekomendasikan film ini sebagai hiburan menyenangkan bagi kanak-kanak dalam diri kita yang mendamba berpetualang jauh ke dalam rimba. Patut diakui memang, tidak semua kanak-kanak beruntung bisa berpetualang seperti Sherina, bukan?

BERGESER
KE PULAU
Tidung



Selau, Seperti di Pulau
Santai, Seperti di Pantai
Tenang, Seperti tak Berutang



Foto
Adithia

Wisatawan menggunakan transportasi publik untuk menyeberang ke Pulau Tidung dari Pelabuhan Kali Adem, Muara Karang.

Bagi kalian praktisi kalender, pasti *ngeh* kalau bulan Mei sampai dengan pertengahan Desember 2019 tidak ada tanggal merah di hari kerja. Tidak heran memang, jika kemudian banyak teman-teman yang butuh tambahan dosis “*vitamin sea*” untuk menyegarkan pikiran dari rutinitas pekerjaan. Nah, di artikel kali ini, penulis berkunjung ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu sebagai pelarian sejenak dari peliknya kehidupan (masih) ibukota.

Pulau Tidung

Pulau Tidung berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Menurut sejarah, Pulau Tidung sudah dihuni sejak tahun 1800-an oleh penduduk yang berasal dari berbagai suku, seperti Bugis,

Mandar, Banten, bahkan Kalimantan. Pulau Tidung sendiri terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil. Kedua pulau ini dihubungkan oleh sebuah jembatan yang disebut Jembatan Cinta.

Berlokasi tidak jauh dari pusat kota Jakarta, Pulau Tidung dapat Pembaca kunjungi dengan menempuh perjalanan selama 3 jam menggunakan kapal kayu atau 1 jam perjalanan dengan menggunakan Kapal *Express* Peln dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke. Sebagai alternatif, pembaca juga bisa berangkat dari Marina Ancol dengan menggunakan kapal cepat selama kurang lebih 1 jam. Tinggal dipilih, mana yang paling sesuai kantong? Bagi pembaca yang ingin menginap, terdapat

banyak pilihan tempat di Pulau Tidung, mulai dari *homestay* hingga *cottage*. Tarif penginapan berkisar antara dari Rp150.000,00 hingga Rp800.000,00 per malam tergantung dari fasilitasnya. Satu hal yang perlu diperhatikan di penginapan adalah air payau yang digunakan untuk mandi sehingga bagi sebagian orang mungkin kurang nyaman setelah mandi. Adapun tempat yang menyediakan air tawar, salah satunya adalah Masjid Agung Nurul Huda yang berada di tengah Pulau Tidung Besar.

Jembatan Cinta

Fungsi utama Jembatan Cinta, sebuah jembatan sepanjang +/- 800 m ini, adalah menghubungkan Pulau Tidung Besar dengan Pulau Tidung Kecil. Dengan *hand rail* yang

Snorkeling,
merupakan
salah satu
kegiatan favorit
di Pulau Tidung.



dicat warna merah muda, tak jarang jembatan ini menjadi *spot* foto bagi para wisatawan dan menjadi pusat kegiatan di Pulau Tidung. Jembatan ini dinamakan Jembatan Cinta tentunya bukan tanpa alasan. Mitos yang berkembang, apabila seseorang membawa pasangannya menyeberangi Jembatan Cinta, maka hubungan mereka akan langgeng. Hal ini dipercaya oleh beberapa *traveller* karena konon, dahulu jembatan ini hanya terbuat dari kayu yang rentan dan mudah rapuh. Banyak jalan di jembatan ini yang tidak bagus, bahkan runtuh. Apabila pasangan tetap melanjutkan perjalanan hingga ke seberang, niscaya hubungan akan langgeng. Namun, apabila pasangan berbalik arah, maka silakan Pembaca simpulkan sendiri. Kini, dengan stuktur jembatan yang lebih kuat

dengan menggunakan beton, menurut pembaca apakah mitos ini masih berlaku?

Selain berfoto di area Jembatan Cinta, masih ada aktivitas lain yang dapat dilakukan. Pembaca bisa mencoba *banana boat*, *flying fish*, dan jetski dengan harga penawaran operator yang bervariasi, mulai dari Rp30.000,00 hingga Rp100.000,00. Oya, Pulau Tidung memiliki keindahan bawah laut yang tidak kalah dengan tempat wisata bahari lain di Indonesia. Bagi wisatawan yang memiliki hobi *snorkeling* juga dapat menghubungi operator untuk menyewa peralatan *snorkeling* dan diantarkan ke *spot* bawah laut yang indah. Untuk *snorkeling*, wisatawan dikenakan biaya per kapal antara Rp200.000,00 hingga Rp300.000,00 dengan kapasitas 10 orang.

Setelah lelah berakti-

vitas, wisatawan Pulau Tidung bisa beristirahat di warung makan sekitar Jembatan Cinta sambil menikmati segarnya es kelapa muda. Menjelang sore, wisatawan penikmat senja biasanya bersepeda ke bagian barat Pulau Tidung Besar untuk menikmati indahnya matahari terbenam. Saat langit cerah dan cuaca sedang baik, matahari terbenam akan nampak menyentuh lautan. Sungguh pemandangan yang menakjubkan!

Di akhir artikel ini, penulis ingin menyampaikan bahwa di tahun 2020, tanggal merah akan lebih banyak pada hari kerja. Jadi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berkinerja dan nikmati liburan dengan tenang dan menyenangkan. Selamat Tahun Baru 2020. *Ganbatte!*

Adithia Ramadhan



SILVER WINNER
Insan PR Indonesia
2019

BRONZE WINNER
Public Relations
Indonesia Awards 2019

#KataSobwas

Apa **skill** yg ingin Sobwas kuasai menghadapi revolusi industri 4.0 ini ?

 **@jannatindah**
"Coding"

 **@andisona50114**
"Financial Engineering"

 **@nidausanah**
"Editing Video"

 **@mrifqizulkarnain**
"Web based programming"

 **@bayumahendralsp**
"Mengolah n analisa big data"

 **@handydito**
"Mengajar"

 **@sukronmakmun94**
"Fintech min"

 **@febrilicious**
"UI, UX"

 **@rahmasitti45**
"Bahasa asing"

 **@arkaprst**
"Big Data Analytics"

 **@zainpatra**
"Pemanfaatan Bigdata, Pemanfaatan Ai, Pemanfaatan Blockchain, dan skill komunikasi"

 **@w_nurwanto**
"Teknologi, public speaking, english language skill dan leadership"

